



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023;
- Mengingat :
 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2553);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja KKP Tahun 2023 yang terdiri atas:
- a. arah kebijakan, sasaran strategis, program (sasaran program, indikator sasaran program, output program, dan indikator output program), dan kegiatan (sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan), serta terkait dukungan terhadap prioritas nasional, proyek prioritas strategis (*major project*), kegiatan tematik, dan terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. matriks Renja KKP Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. rincian *major project* dan prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
 - d. rincian pagu alokasi anggaran per program dan per unit kerja eselon I tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Renja KKP Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi unit kerja eselon I untuk dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2023.
- KETIGA : Dalam rangka pencapaian target kinerja, pimpinan unit kerja eselon I melakukan monitoring dan evaluasi.
- KEEMPAT : Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA digunakan untuk melakukan perbaikan pelaksanaan rencana kerja.

- KELIMA : Pimpinan unit kerja eselon I harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Renja KKP Tahun 2023 setiap bulan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2023

A. Arah Kebijakan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

RKP Tahun 2023 memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing". Tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020–2024 tetap dipertahankan dalam RKP Tahun 2023 menjadi tujuh Prioritas Nasional (PN), yakni (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Pencapaian tujuh PN tersebut didukung oleh pelaksanaan 45 proyek prioritas strategis/*Major Project* (MP) sebagai *leverage point* yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2023. Dalam Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024, disebutkan bahwa MP dirancang sebagai penekanan kebijakan

dan pendanaan dalam RPJMN, RKP dan APBN tahunannya. Dalam pelaksanaannya, indikasi pendanaan MP dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta direktif presiden. Hal ini untuk memastikan MP dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Dalam RPJMN Tahun 2020–2024 terdapat 41 MP yang kemudian berkembang menjadi 43 MP pada RKP Tahun 2021. Dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan pembangunan, pada RKP Tahun 2022 jumlah MP kembali dikembangkan menjadi 45 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023. Penjabaran lebih rinci terkait informasi 45 MP disampaikan dalam Bab IV pada masing-masing PN.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian target-target pembangunan RKP Tahun 2023 menuntut adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara spesifik dan signifikan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan, serta strategi pembangunan tahun 2023. Untuk itu ditetapkan 14 MP yang menjadi penekanan (*highlight*), yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, (11) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, (12) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (13) Transformasi Digital, dan (14) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah.

Tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19). Kapasitas produktif perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19 ditingkatkan melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian. Berlanjutnya agenda transformasi ekonomi tersebut diperkirakan akan mendorong akselerasi ekonomi Indonesia pada tahun 2023.

Setelah mengalami pemulihan kuat pada tahun 2021, ekonomi global diperkirakan mengalami perlambatan pada tahun 2023. Perekonomian negara berkembang diperkirakan belum mampu kembali menuju tren sebelum pandemi pada tahun 2022, berbeda dibandingkan dengan negara maju yang diperkirakan sudah kembali ke tren sebelum pandemi. Perlambatan ekonomi global tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan tingkat vaksinasi global antarnegara, penyebaran varian baru COVID-19, kebijakan fiskal dan moneter yang lebih ketat, berlanjutnya gangguan rantai pasok, dan dampak luka memar akibat pandemi Covid-19 (*scarring effect*).

Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020–2024 menghadapi tantangan besar akibat adanya pandemi Covid-19 di hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak serius pada kehidupan manusia dan

mungkin masih berlanjut hingga tahun 2022. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi, khususnya pada sektor industri dan pariwisata, yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2023.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan pada tahun 2023 berdasarkan dokumen RKP tahun 2023 akan ditekankan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar. Di sisi lain, hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2020 menunjukkan bahwa realisasi PN 3, terkait kinerja nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, berdasarkan dokumen RKP tahun 2023, dengan memperhatikan sasaran RPJMN tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian, maka RKP 2023 mengusung tema, "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024 (Renstra KKP Tahun 2020–2024), visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020–2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yang merupakan penjabaran dari visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020–2024, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN tahun 2020–2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi Kelautan dan Perikanan";
2. "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing" melalui "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional";
3. "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" melalui "Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"; dan
4. "Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya" melalui "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan".

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020–2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan ditempuh dalam tahun 2020–2024, terdiri atas:

1. Perluasan wilayah konservasi perairan;
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap dan untuk kesejahteraan nelayan;
3. pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir, dan pedalaman yang ramah lingkungan dengan komoditas unggulan berorientasi ekspor (udang, lobster, kepiting, dan rumput laut) dan komoditas sesuai kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan;
4. Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berkelanjutan sebagai landasan pemanfaatan dan pengusahaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; dan
5. Penanganan dan Pengelolaan Sampah Laut dengan program Bulan Cinta Laut.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut akan diperkuat dengan:

1. Peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor;
 2. Peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan *advanced technology*; dan
 3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan.
- Seluruh kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global.

B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang telah ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2023
1	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) (Indeks)	62,66
2	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	5,00-6,00
		Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	7,66
		Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	61,02
3	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	≤76
		Luas kawasan konservasi perairan (juta ha)	29,1
4	Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) (%)	70
5	Tatakelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur	11
		Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Rencana Zonasi)	30
		Persentase Kepatuhan (<i>compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	97
		Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2023
6	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi perikanan (juta ton)	30,58
		Produksi garam (juta ton)	2,0
		Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)	98
		Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan-KUR KP dan BLU LPMUKP (triliun)	9,91
7	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan (%)	93
		Jumlah WPPNRI rawan kegiatan kelautan dan perikanan ilegal yang diawasi	8
8	Reformasi Birokasi KKP yang berkualitas	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP (nilai)	74
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA (nilai)	90

C. Program Tahun 2023

Program pada tahun 2023 melanjutkan nomenklatur dan jumlah program pada tahun 2022 sebanyak 5 (lima) program yang telah menggunakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai salah satu upaya reformasi perencanaan dan penganggaran. RSPP diharapkan dapat mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program priority*, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan integrasi belanja antar kementerian/lembaga untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat-daerah, serta mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur program, kegiatan dan output kegiatan yang mencerminkan *real work* atau konkret.

Sebagai tindak lanjut Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, beralihnya tugas dan fungsi serta kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan setiap kementerian dan/atau lembaga menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), maka terdapat 1 (program) yang tidak diimplementasikan yaitu Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Nomenklatur program Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 beserta sasaran, indikator sasaran, target, dan satuannya adalah sebagai berikut:

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01-SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	01-Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	70	persen
	02-SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk <i>Start Up</i> (Usaha Rintisan)	01-Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan)	392	orang
	03-Kelompok kelautan dan perikanan yang	01-Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk	3.000	kelompok

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
	ditumbuhkan dan dikembangkan	02-Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya	1.800	kelompok
	04-Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat	01-Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP	7	desa
	05-Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan	01-Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan	14	unit
	OUTPUT PROGRAM	INDIKATOR OUTPUT PROGRAM		
	01-Hasil Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan SDM yang mendukung kesejahteraan masyarakat	01-Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	70	persen
		02- Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan)	494	orang
		03-Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk	3.000	kelompok
		04-Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya	1.800	kelompok
		05-Desa/kawasan mitra yang menerapkan iptek KP	6	paket
		06 - Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan	11	Unit
EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	01-Produk Olahan KP Berdaya Saing	01-Volume Produk Olahan KP Berdaya Saing	7,35	juta ton
	03-Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	01-Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor	137	negara
		02-Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	98	persen
		03-Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI	100	lokasi
		04-Nilai ekspor hasil perikanan (USD Miliar)	7,66	USD miliar
		05-Konsumsi ikan (kg/kapita)	61,02	kg/kapita
04-Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan meningkat	01-Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (indeks)	104,5	indeks	

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
	OUTPUT PROGRAM	INDIKATOR OUTPUT PROGRAM		
	01-Nilai transaksi dari promosi skala internasional	01-Nilai transaksi dari promosi skala internasional	300	juta USD
	02-Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Inovatif dan Berdaya Saing	01-Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan penerap Inovasi yang berdaya saing	67,5	persen
	03-Utilitas UPI yang meningkat	01-Persentase Utilitas UPI yang meningkat	68	persen
	04-Penjaminan Mutu Produk KP	01-Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor	137	negara
		02-Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	98	persen
		03-Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI	100	lokasi
FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	02-Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	02-Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha)	15,8	juta ha
		03-Luas kawasan konservasi (juta hektar)	29,1	juta ha
	03-Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	04-Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	18	jenis
	04-Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali	05-Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali	25	lokasi
	OUTPUT PROGRAM	INDIKATOR OUTPUT PROGRAM		
	01-Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif)	01-Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif)	15,8	juta ha
	04-Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali	04-Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali	25	lokasi
HB-Program Pengelolaan Perikanan	01-Kesejahteraan Nelayan Meningkat	01-Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107	indeks

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
dan Kelautan	02. Pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif	01-Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	100	persen
	03- Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif	01-Persentase penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	93	persen
	04- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya	01-Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	104	NTPI
		02-Pendapatan Pembudidaya	3.650.000	rupiah
	05-Tatakelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab	01-Persentase Kepatuhan (<i>compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	97	persen
	06-Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif	01-Jumlah WPP NRI rawan kegiatan kelautan dan perikanan ilegal yang diawasi	8	WPPNRI
	07- Kesejahteraan petambak garam meningkat	01-Nilai Tukar Petambak Garam	101,5	indeks
	11- Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	01-Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan	6,1	triliun rupiah
		02-Kinerja Logistik Hasil Perikanan	58	indeks
		03-Pembiayaan usaha KP melalui kredit program	6,49	triliun rupiah
		05-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BKIPM	3,36	indeks
06-Rasio pengendalian ekspor dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi		90	persen	
09-Jumlah jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi		4	ragam	
10-Jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan		10	kawasan	
11-Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit (jumlah produk sesuai persyaratan		100	persen	

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
		Indonesia/total impor yang masuk)		
		12-Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan	74	persen
	12-Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan	01-Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	≤76	persen
	13-Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	01-Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan kecil	30	kawasan
		02-Persentase penyelesaian persyaratan dasar perizinan pemanfaatan ruang laut	100	persen
	15-Produktivitas perikanan budidaya meningkat	01-Produksi Perikanan Budidaya	21,58	juta ton
	16-Poduktivitas dan usaha garam nasional meningkat	01-Produksi garam	2,0	juta ton
	17-Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	01-Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola	10	kawasan
	18-Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	01-Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif)	3	komunitas
	19-Tingkat Kemandirian SKPT meningkat			
	23-Perumusan kebijakan KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan	01-Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan	11	kebijakan
	OUTPUT PROGRAM	INDIKATOR OUTPUT PROGRAM		
	02-Ikan dan hasil perikanan yang terjamin kesehatan, mutu dan keamanannya	01-Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit	100	persen
		02-Rasio pengendalian ekspor dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi	90	persen

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
		03-Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan	74	persen
		04-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BKIPM	3,36	indeks
	05-Produktivitas perikanan tangkap meningkat	04-Jumlah produksi perikanan tangkap	9	juta ton
		05-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap	3,31	triliun rupiah
	07-Produksi Perikanan Budidaya	01-Produksi Perikanan Budidaya (Ikan)	9,48	juta ton
		02-Produksi Perikanan Budidaya (Rumput Laut)	12,1	juta ton
		03-Produksi Ikan Hias	2,2	miliar ekor
		04-Nila Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	104	indeks
		02-Rata-Rata Pendapatan Pembudidaya Ikan	3.650.000	rupiah
		06-Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan Perikanan Budidaya	40	Klaster (kumulatif)
		07-Korporasi Pembudidaya yang dikembangkan	10	korporasi
		08-Pelaku usaha KP yang diawasi	01-Persentase Kepatuhan (<i>compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	97
	10- WPPNRI yang dipantau dan diawasi	01- Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP	100	persen
		02-Jumlah WPP NRI rawan kegiatan kelautan dan perikanan ilegal yang diawasi	8	WPPNRI
	11-Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas ditangani	01-Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	93	persen
	12-Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang merealisasikan investasi dan mendapatkan pembiayaan kredit program meningkat	01-Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang merealisasikan investasi dan mendapatkan pembiayaan kredit program yang meningkat	5	persen
	13-Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola	01-Jumlah Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola	5	koridor
	17-Jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar	01-Jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana	10	kawasan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
	yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan	prasarana dan/atau dimanfaatkan		
	18-Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan	01-Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan	30	kawasan
	19-Produksi garam	01-Produksi Garam	2,0	juta ton
	22-Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab	22-WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur	11	WPP
	23-Hasil Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang dimanfaatkan industri dan masyarakat	01-Hasil NSPK Pengelolaan KP	15	NSPK
		02-Sarana dan Prasarana Pengelolaan KP	5	unit
WA-Program Dukungan Manajemen	03-Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup KKP	01-Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP	≤1	persen
		02-Tingkat Kapabilitas Itjen KKP	3	level
		03-Nilai Evaluasi atas Maturitas SPIP KKP	3	level
		04-Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK	78	unit
		05-Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP	82	nilai
		06-Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP	80	nilai
		07-Nilai Integritas KKP	76	nilai
		08-Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen KKP	79	indeks
		09-Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	87	persen
		10-Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP	85	persen
		11-Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP	89	nilai

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
		12-Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP	87	nilai
		13-Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP	81	persen
		14-Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP	81	persen
		15-Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP	81	persen
		16-Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP	75	persen
		17-Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP	18	rekomendasi
		18-Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP	88	persen
		19-Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Lingkup Itjen KKP	80	persen
		20-Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP	4,15	indeks
	07-Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen PSDKP	01-Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP	33	nilai
		02-Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen PSDKP	80	indeks
		03-Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	70	indeks
		04-Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK	12	unit
		05-Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	77	indeks

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
		06-Nilai PM SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP	87,5	nilai
		07-Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik	1	unit
		08-Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP	<1	persen
		09-Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP	3	level
		10-Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PSDKP	77,5	persen
		11-Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSDKP	77,5	persen
		12-Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	88	persen
		13-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP	75	persen
		14-Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP	90	indeks
		15-Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP	88	nilai
	09-Terkelolanya Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP	01-Nilai PM PRB Ditjen PDSPKP	33	nilai
		02-Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP (kumulatif)	4	unit kerja
		03-Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Ditjen PDSPKP	≤1	persen
		04-Indeks Profesionalitas ASN	75	indeks
		05-Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP	84,5	nilai
		06-Nilai Maturitas SPIP Ditjen PDSPKP	3	level
		07-Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen PDSPKP	88	persen

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
		08-Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP	75	persen
		09-Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Ditjen PDSPKP	1	unit kerja
		10-Nilai IKPA Lingkup Ditjen PDSPKP	90	nilai
		11-Nilai NKA Lingkup Ditjen PDSPKP	88	nilai
		12-Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Ditjen PDSPKP	77,5	persen
		13-Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP	77,5	persen
		14-Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PDSPKP	77,5	persen
	10-Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Jenderal	01-Nilai PM PRB Setjen	34	nilai
		02-Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Sekretariat Jenderal	2	unit kerja (kumulatif)
		03-Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Setjen	≤1	%
		04-Opini atas Laporan Keuangan KKP	WTP	opini
		05-Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat Jenderal	78	indeks
		06-Nilai PM SAKIP Sekretariat Jenderal	84	nilai
		07-Tingkat Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal	3	level
		08-Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal	88	persen
		09-Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal	75	persen
		10-Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik	1	unit kerja

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
		Lingkup Sekretariat Jenderal		
		11-Nilai IKPA Setjen	90	nilai
		12-Nilai NKA Setjen	88	nilai
		13-Nilai Sakip KKP	83	nilai
		14-Indeks Sistem Merit	0,83	indeks
		15-Indeks Perencanaan	80	indeks
		16-Indeks kematangan UKPBJ	9	indeks
		17-Nilai pengawasan kearsipan	90	nilai
		18-Nilai SPBE KKP	3,9	nilai
		19-Rasio jumlah pemberitaan negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor KP	<10	persen
		20-Indeks kualitas kebijakan	75	indeks
	11-Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Ditjen PRL	01-Nilai PM PRB Ditjen PRL	35,5	nilai
		02-Indeks Profesionalitas ASN Lingkup DJPRL	75	indeks
		03-Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup DJPRL	9	unit kerja
		04-Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup DJPRL	<1	persen
		05-Nilai PM SAKIP Lingkup DJPRL	83,5	nilai
		06-Nilai Maturitas SPIP DJPRL	3	level
		07-Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup DJPRL	88	persen
		08-Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup DJPRL	75	persen
		09-Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup DJPRL	1	unit kerja
		10-Nilai IKPA	90	nilai
		11-Nilai NKA	88	nilai
		12-Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Ditjen PRL	12	bulan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
12-Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya		01-Nilai PM PRB DJPB	33	nilai
		02-Indeks Profesionalitas ASN Lingkup DJPB	75	indeks
		03-Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran lingkup DJPB	≤1	persen
		04-Nilai PM SAKIP Lingkup DJPB	87	nilai
		05-Nilai Maturitas SPIP DJPB	3	level
		06-Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup DJPB	88	persen
		07-Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup DJPB	75	persen
		08-Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup DJPB	1	unit kerja
		09-Nilai IKPA Lingkup DJPB	90	nilai
		10-Nilai NKA Lingkup DJPB	88	nilai
		11-Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup DJPB	8	unit kerja (kumulatif)
		12-Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup DJPB	77,5	persen
		13-Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa lingkup DJPB	77,5	persen
13-Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien		01-Nilai PM PRB DJPT	32	nilai
		03-Unit Kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	11	unit kerja (kumulatif)
		04-Batas tertinggi persentase nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Tangkap dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2021	≤1	persen
		05-Nilai PM SAKIP DJPT	85	nilai
		06-Nilai Maturitas SPIP DJPT	3	level

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
14-Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BRSDMKP		01-Nilai PM PRB BRSDMKP	32	nilai
		02-Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup BRSDMKP (kumulatif)	12	unit
		03-Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup BRSDMKP	≤1	persen
		04-Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BRSDM	75	indeks
		05-Nilai PM SAKIP Lingkup BRSDM	81,22	nilai
		06-Nilai Maturitas SPIP BRSDM	3	level
		07-Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup BRSDM	88	persen
		08-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BRSDM	75	persen
		09-Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Lingkup BRSDM	1	unit kerja
		10-Nilai IKPA Lingkup BRSDM	89	nilai
		11-Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BRSDM	86	nilai
		12-Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BRSDM	75	persen
		13-Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa lingkup BRSDM	75	persen
		14-Pendidikan dan pelatihan aparatur	5.005	orang
15-Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BKIPM		01-Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) BKIPM	32	nilai
		02-Indeks Profesionalitas ASN	74	indeks
		03-Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	3	unit kerja
		04-Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran	≤1	persen
		05-Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BKIPM	85	nilai

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
		06-Nilai Maturitas SPIP	3	level
		07-Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	86	persen
		08-Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	70	persen
		09-Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik	1	unit kerja
		10-Nilai IKPA	89	persen
		11-Nilai NKA	87	nilai
		12-Indeks Kualitas Kebijakan lingkup BKIPM	83	indeks
	OUTPUT PROGRAM	INDIKATOR OUTPUT PROGRAM		
	01-Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan DJPSDKP	01-Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM PRB) lingkup Ditjen PSDKP	33	nilai
		02-Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen PSDKP	80	indeks
		03-Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	70	indeks
		04-Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK	12	unit
		05-Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	77	indeks
		06-Nilai PM SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP	87,5	nilai
		07-Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik	1	unit
		08-Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP	<1	persen
		09-Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP	3	level
		10-Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PSDKP	77,5	persen
		11-Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSDKP	77,5	persen
		12-Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan	88	persen

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
		sistem manajemen pengetahuan yang terstandar		
		13-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP	75	persen
		14-Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP	90	nilai
		15-Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP	88	nilai
	03-Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan KKP dan Inspektorat Jenderal	01-Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran KKP	≤1	persen
		02-Tingkat efektifitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP	81	persen
		03-Tingkat efektifitas pengawasan terhadap pengelolaan BMN lingkup KKP	81	persen
		04-Tingkat efektifitas pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa lingkup KKP	81	persen
		05-Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP	82	nilai
		06-Tingkat Maturitas SPIP KKP	3	level
		07-Nilai PM SAKIP KKP	A (83)	nilai
		08-Unit Kerja KKP yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	78	unit kerja
		09-Nilai Integritas KKP	71	nilai
		10-Level Kapabilitas Internal Audit (IACM) Itjen	3	level
	04-Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	01-Nilai PM PRB DJPB	33	nilai
		02-Indeks Profesionalitas ASN Lingkup DJPB	75	indeks
		03-Batas Toleransi Materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total realisasi Anggaran lingkup DJPB	≤1	persen
		04-Nilai PM SAKIP lingkup DJPB	87	nilai
		05-Nilai Maturitas SPIP DJPB	3	level

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
		06-Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar Lingkup DJPB	88	persen
		07-Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup DJPB	8	unit kerja (kumulatif)
		08-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPB	75	persen
		09-Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup DJPB	1	unit kerja
		10-Nilai IKPA lingkup DJPB	90	nilai
		11-Nilai NKA lingkup DJPB	88	nilai
		12-Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Ditjen PB	77,5	persen
		13-Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PB	77,5	persen
	05-Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BRSDMKP	01-Nilai PM PRB BRSDMKP	32	nilai
		02-Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup BRSDMKP (kumulatif)	12	unit
		03-Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup BRSDMKP	≤1	persen
		04-Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BRSDM	75	indeks
		05-Nilai PM SAKIP Lingkup BRSDM	81,22	nilai
		06-Nilai Maturitas SPIP BRSDM	3	level
		07-Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BRSDM	88	persen
		08-Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDM	75	persen
		09-Unit yang menerapkan inovasi	1	unit kerja

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
		elayanan publik Lingkup BRSDM		
		10-Nilai IKPA Lingkup BRSDM	89	nilai
		12-Nilai NKA Lingkup BRSDM	86	nilai
		12-Persentase Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BRSDM	75	persen
		13-Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BRSDM	75	Persen
		14-Pendidikan dan pelatihan aparatur	5.005	orang
	06-Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkup Sekretariat Jenderal	01-Nilai PM PRB Setjen	34	indeks
		02-Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Sekretariat Jenderal	2	unit kerja (kumulatif)
		03-Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Setjen	≤1	persen
		04-Opini atas Laporan Keuangan KKP	WTP (5)	opini
		05-Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat Jenderal	78	indeks
		06-Nilai PM SAKIP Sekretariat Jenderal	80,5	nilai
		07-Tingkat Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal	3	level
		08-Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal	88	persen
		09-Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal	75	persen
		10-Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Sekretariat Jenderal	1	unit kerja
		11-Nilai IKPA Setjen	90	nilai
		12-Nilai NKA Setjen	88	nilai
		13-Nilai Sakip KKP	83	nilai
		14-Indeks Sistem Merit	0,83	indeks
		15-Indeks Perencanaan	80	indeks
		16-Indeks kematangan UKPBJ	9	indeks

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
		17-indeks Pengawasan Kearsipan	90	indeks
		18-Nilai SPBE KKP	3,9	nilai
		19-Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor KP	<10	persen
		20-Indeks Kualitas Kebijakan	75	indeks
	07-Terkelolanya dengan baik BLU Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	01-Persentase pencapaian target PNBPN BLU	97	persen
		02-Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP	80	persen
	09-Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP	01-Nilai PM PRB Ditjen PDSPKP	35,5	nilai
		02-Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP (kumulatif)	4	unit kerja
		03-Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Ditjen PDSPKP	≤1	persen
		04-Indeks Profesionalitas ASN	75	nilai
		05-Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP	84,5	nilai
		06-Nilai Maturitas SPIP Ditjen PDSPKP	3	level
		07-Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen PDSPKP	88	persen
		08-Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP	75	persen
		09-Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Ditjen PDSPKP	1	unit kerja
		10-Nilai IKPA Lingkup Ditjen PDSPKP	90	nilai
		11-Nilai NKA Lingkup Ditjen PDSPKP	88	nilai
		12-Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PDSPKP	77,5	persen
		13-Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup Ditjen PDSPKP	77,5	persen

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
		14-Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP	77,5	persen
	11-Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Ditjen PRL	01-Nilai PM PRB Ditjen PRL	35,5	nilai
		02-Indeks Profesionalitas ASN Lingkup DJPRL	75	indeks
		03-Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup DJPRL	9	unit kerja
		04-Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup DJPRL	<1	persen
		05-Nilai PM SAKIP Lingkup DJPRL	83,5	nilai
		06-Nilai Maturitas SPIP DJPRL	3	level
		07-Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup DJPRL	88	persen
		08-Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup DJPRL	75	persen
		09-Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup DJPRL	1	unit kerja
		10-Nilai IKPA	90	nilai
		11-Nilai NKA	88	nilai
		12-Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Ditjen PRL	12	bulan
		13-Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	02-Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap	74
	07-Persentase unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar		86	persen
	08-Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap		70	persen
	09-Unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan		1	unit kerja

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
		inovasi pelayanan publik		
		10-Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap	89	nilai
		11-Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	87	nilai
		12-Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	75	persen
		13-Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	75	persen
		14-Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	75	persen
	15-Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BKIPM	01-Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) BKIPM	32	nilai
		02-Indeks Profesionalitas ASN	74	indeks
		03-Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	3	unit kerja
		04-Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran	≤1	persen
		05-Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BKIPM	85	nilai
		06-Nilai Maturitas SPIP	3	level
		07-Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	86	persen
		08-Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	70	persen
		09-Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik	1	unit kerja
		10-Nilai IKPA	89	persen
		11-Nilai NKA	87	nilai
		12-Indeks Kualitas Kebijakan lingkup BKIPM	83	indeks

D. Kegiatan Tahun 2023

Kegiatan pada tahun 2023 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kegiatan. Nomenklatur kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023 beserta sasaran, indikator, target, dan satuannya adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2375- Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	01- Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	01-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih	31.490	orang
	02- Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	01-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang bersertifikat Kompetensi	1.800	orang
	03- Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	01-Kajian Inovasi yang diterapkan untuk Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Kaji Terap)	13	produk
	04- Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kinerja usahanya	47.000	kelompok
	05- Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	01-Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan	16	kelompok masyarakat
		02-Pengujian Kelayakan Teknologi untuk Penyuluh Perikanan	3	produk
	06-Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	10	unit
	07-Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	01-Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	9	layanan
2376- Pendidikan Kelautan dan Perikanan	01- Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	01-Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten	8.291	orang
	02- Terselenggaranya Pengabdian Pendidikan Tinggi KP	01-Jumlah pengabdian pendidikan tinggi KP	13	paket
	03- Terselenggaranya Kajian Pendidikan Tinggi KP	01-Jumlah Kajian Pendidikan Tinggi KP	20	kajian
	04-Tersedianya Sarana dan	01-Jumlah sarana pendidikan KP yang	2	unit

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
	Prasarana Pendidikan KP	ditingkatkan kapasitasnya		
		02-Jumlah Prasarana Pendidikan Tinggi KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	unit
	05-Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pendidikan KP	01-Jumlah Layanan NSPK Pendidikan KP	5	NSPK

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2357- Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	01-Terlaksananya Promosi Pemasaran Produk Perikanan	01-Jumlah promosi Gemarikan	185	promosi
		02-Jumlah Promosi Produk Kelautan dan Perikanan dalam negeri oleh satker daerah	34	promosi
		03-Jumlah promosi skala internasional yang dilaksanakan	6	promosi
		04-Jumlah Promosi Produk Kelautan dan Perikanan dalam negeri	3	promosi
	02-Terbangunnya sarana dan prasarana pemasaran	01-Jumlah Pasar Ikan yang dibangun	3	unit
		02-Jumlah Sentra Kuliner Ikan yang dibangun	2	unit
	03-Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan pasar ikan	01-Jumlah lokasi pembinaan pengelolaan pasar ikan	100	lembaga
	04-Terselenggaranya pendampingan <i>major project</i> pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional	01-Jumlah Kegiatan Pendampingan <i>major project</i> pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional	1	dokumen
	05-Tersedianya Sistem Informasi Pemasaran	01-Jumlah Sistem Informasi Bursa Pasar Ikan yang dibangun	1	sistem informasi
	06-Terfasilitasinya Forum Perluasan Akses Pasar Negara Tujuan Ekspor	01- Jumlah Forum Perluasan Akses Pasar Negara Tujuan Ekspor yang di fasilitasi	3	forum

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
	07-Tersedianya Data dan informasi Publik Bidang Pemasaran Hasil KP	01-Jumlah Profil Pasar Ekspor Hasil Kelautan Perikanan	4	data
		02-Jumlah Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan	3	data
	08-Tersedianya Layanan Perizinan usaha Pemasaran bagi pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	01- Jumlah Layanan Perizinan usaha Pemasaran bagi pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	1	layanan
	09-Tersedianya Bantuan Peralatan/Sarana Pemasaran	01-Jumlah Peralatan Pemasaran	5.324	unit
		02-Kendaraan Pemasaran Alih Teknologi Informasi	3	unit
2358- Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	01-Terlaksananya Sertifikasi Produk KP	01-Jumlah produk yang mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)/ Sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP)	5.000	produk
	02-Terlaksananya pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP	01-Jumlah unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina	2.675	UMKM
		02-Jumlah UPI skala menengah dan besar yang dibina	1.070	industri
		03-Jumlah industri penanganan dan pengolahan hasil KP yang dibina oleh daerah	3.070	industri
	03- Tersedianya Bantuan Peralatan/ Sarana Pengolahan produk KP	01-Jumlah chest freezer yang disediakan	300	unit
		02-Jumlah peralatan pengolahan ikan yang disediakan	315	paket
		03-Jumlah Sarana Pasca Panen yang disediakan	25	unit
	04-Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk KP	01-Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun dalam Kawasan Perikanan Terpadu	2	unit
		02-Jumlah Pabrik Es yang dibangun	3	unit

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
	05-Tersedianya layanan Data dan Informasi Penguatan Daya Saing Produk KP	01-Jumlah Teknologi Informasi Mendukung Penghitungan NTPHP yang disediakan	1	data
		02-Jumlah Data Profilling Industri pengolahan Hasil Perikanan (Losses dan Utilitas)	2	unit
	10-Tersedianya Rancangan RSNI produk hasil KP yang dirumuskan	01-Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang dirumuskan	15	produk
3989- Pengendalian Mutu	01-Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	01-Dokumen Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	8	dokumen
		02-Dokumen Registrasi UPI Ke Negara Mitra dan atau Negara Tujuan Ekspor	20	dokumen
		03-Persentase penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan	95	persen
		04-Penjaminan mutu hasil perikanan di Wilayah RI	80	lokasi
		05-Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i>	250	UPI
		06-Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di pintu pemasukan wilayah RI	100	persen
		07-Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	98	persen
		08-Sertifikasi Hazard <i>Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	2.900	produk
		09-Keberterimaan Produk di negara tujuan ekspor	137	negara
		10-Supplier yang menerapkan Cara	300	sertifikat

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)		
		11-Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu	13	lokasi
5279- Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	05-Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Melalui Inkubasi Bisnis dan Pendampingan Teknologi	01-Jumlah Pelaku Usaha yang Dibina dalam Inkubator Bisnis	50	UMKM
		02-Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan perikanan	40	UMKM
	06-Terselenggaranya Diseminasi Informasi Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Peserta Diseminasi Informasi Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	1.000	orang
	09-Terlaksananya Layanan Sertifikasi dan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Layanan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan	1	layanan
		02-Jumlah Layanan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan	1	layanan
	10-Tersedianya Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP	01-Jumlah Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang disediakan	3	produk

3. Program Kualitas Lingkungan Hidup

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2362- Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	01-Terwujudnya Kawasan konservasi baru yang ditetapkan/dicadangkan di tingkat Nasional dan Daerah	01-Luas Kawasan Konservasi Baru	200.000	ha
	02-Tertatanya Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Operasional	01-Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Kumulatif)	15.800.000	ha

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
	03-Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang dilindungi, dan/atau dilestarikan	01- Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan	18	jenis
	04-Termanfaatkannya Kawasan Konservasi secara berkelanjutan	01-Luas kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (kumulatif)	15.800.000	ha
	06-Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut	01-Jejaring, Kemitraan, Kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut yang diimplementasikan	7	kerja sama
		02-Kelompok Penggerak konservasi yang mendukung Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	20	kelompok
	08-Termanfaatkannya Keanekaragaman Hayati perairan yang dikelola secara Berkelanjutan	01- Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan	18	jenis
4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01-Terwujudnya Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	01-Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim	6	kawasan
	02-Terwujudnya Kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	01-Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	6	lokasi
		02-Luas kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	100	ha
	03-Terwujudnya Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	01-Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran	42	kawasan

4. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2337- Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	01-Pengelolaan Kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing	01-Persentase kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang operasional sesuai standar	10	persen
	02-Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi	01-Persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi	10	persen
	03-Pemanfaatan hasil pengembangan penangkapan ikan yang berdaya saing	01-Persentase hasil pengembangan penangkapan ikan yang dimanfaatkan	70	persen
2338- Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	02-Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal	01-Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya	15	persen
	03-Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal	01-Persentase pemenuhan prasarana pemungutan PNBP pasca produksi	100	persen
	04-Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang berdaya saing	01-Tingkat operasional pelabuhan perikanan	77,5	persen
2339- Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	01-Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	01-Persentase pengelolaan perizinan berusaha sub sektor perikanan tangkap sesuai ketentuan	100	persen
	02-Pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing	01-Persentase pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing	100	persen
	03-Pengelolaan sarana pemungutan PNBP pasca produksi	01-Persentase pemenuhan sarana pemungutan PNBP pasca produksi	100	persen
	04-Korporasi nelayan yang dikembangkan	01-Jumlah korporasi nelayan yang dikembangkan	5	korporasi
2341- Pengelolaan Sumber Daya Ikan	01-Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang bertanggung jawab	01-Persentase pelaksanaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan	80	persen
		02-Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		di ZEEI dan Laut Lepas		
		03-Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI	100	persen
	02-Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	01-Persentase jumlah WPP perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya	57	persen
2344- Pengelolaan Perbenihan Ikan	01-Terkelolanya Sistem Perbenihan Ikan yang berkelanjutan	01-Sarana Perbenihan Ikan yang disalurkan ke masyarakat	429	unit
		02-Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana UPR/HSRT	8	unit
		03-Produksi Induk Unggul untuk bantuan dan operasional UPT	1.038.045	ekor
		04-Bantuan Benih Ikan Air Tawar, Payau dan Laut yang disalurkan ke masyarakat	118.550.936	ekor
		05-Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang diterbitkan	750	lembaga
		06-Pusat Produksi Benih dan Induk yang dikembangkan	3	unit
		07-Prasarana Perbenihan yang dikembangkan di Kampung Perikanan Budidaya	16	unit
		08-Kebijakan Tata Kelola Bidang Perbenihan	10	Rekomendasi kebijakan
		09-Prasarana Perbenihan yang dikembangkan di Kampung Perikanan Budidaya	32	unit
		2345- Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	01-Terkelolanya Sistem Kawasan dan Kesehatan Ikan yang berkelanjutan	01-Sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan
02-Sampel monitoring residu dan monitoring	6.810			sampel

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		penyakit ikan yang diuji		
		03-Sarana kawasan perikanan budidaya yang disalurkan ke masyarakat	3.915	unit
		04-Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)	55	unit
		05-Klaster kawasan tambak Udang dan Bandeng yang dikembangkan	18	unit
		07-Prasarana produksi di UPT yang direhabilitasi dan ditingkatkan	7	unit
		08-Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	3	unit
		09-Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan	5	rekomendasi kebijakan
2346- Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	01-Terkelolanya Sistem Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya yang berkelanjutan	01-Sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat	407	unit
		02- Unit budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB))	7.500	lembaga
		03-Bantuan Premi Asuransi Pembudidaya Ikan Skala Kecil yang Disalurkan	5.000	ha
		04-Perizinan Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan	50	lembaga
		05-Kebijakan tata kelola bidang produksi dan usaha	12	rekomendasi kebijakan
		06-Sarana produksi dan usaha yang dikembangkan (MP Korporasi)	10	unit
		07-Rekomendasi bidang lahan pembudidaya ikan yang akan disertifikasi	5.000	bidang

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		08-Sarana teknologi bidang produksi dan usaha pembesaran ikan yang diproduksi dan didiseminasikan oleh UPT	15	unit
2350- Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	02- Terselenggaranya sistem pemantauan kapal perikanan	01-Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP	80	indeks
	03- Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan	01-Persentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	100	persen
		02-Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	100	persen
	04- Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	01-Tingkat keaktifan Provinsi dalam pembinaan Pokmaswas	90	persen
		02-Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP	87	persen
	05- Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif	01-Indeks kinerja operasi pesawat patroli	93	indeks
		02-Indeks kinerja operasi kapal pengawas	87,6	indeks
		03-Indeks kinerja operasi <i>speedboat</i> pengawas	87,6	indeks
		04-Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP	91	indeks
	2351- Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	01- Terselenggaranya Penangananan Pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif	01-Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	93
02-Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti			93	persen
03-Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal			93	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		04-Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif	80	persen
		05-Persentase Efektifitas Supervisi bidang Penanganan Pelanggaran	80	persen
		06-Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan	80	persen
	02-Terselenggaranya penyadartahuan nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal	01-Nilai pemahaman nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal	73	nilai
2352- Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	01-Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan	01-Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan	97	persen
		02-Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup UPT PSDKP	100	persen
		03-Persentase efektivitas pelaksanaan audit tata ruang laut	80	persen
	02-Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	01-Nilai pemahaman masyarakat dalam penyadartahuan bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	73	nilai
	03-Terselenggaranya penanganan sengketa, kerusakan dan/atau pencemaran di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil	01-Persentase efektivitas penanganan sengketa, kerusakan dan/atau pencemaran di WP3K	80	persen
2353- Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	01-Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan	01-Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Perikanan	97	persen
		02-Persentase penyelesaian pemeriksaan	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup UPT PSDKP		
	02-Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	01-Nilai pemahaman masyarakat dalam penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan	73	nilai
2356-Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	01-Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan	1	unit
	02-Terkelolanya Rantai Pasok Hasil Perikanan Dalam Koridor Logistik	01-Jumlah Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok	8	lembaga
		02-Jumlah Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	1	rekomendasi kebijakan
	03-Terserap dan Tersimpannya Hasil Perikanan dari Sentra Produksi	01-Jumlah pelaku usaha perikanan yang dibina dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan	18	pelaku usaha
	04-Terdistribusikannya hasil kelautan dan perikanan	01-Jumlah pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan	18	kesepakatan
	05-Tersedianya dan termanfaatkannya sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan	01-Jumlah Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan	19	unit
	06-Tersedianya Sarana Distribusi Hasil Perikanan	01-Jumlah pengadaan sarana distribusi yang disediakan	26	unit
	11-Tersedianya Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen	01-Jumlah Layananan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen yang disediakan	1	layanan
	12-Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang	01-Jumlah Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang	8	lembaga

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
	14-Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan	01-Jumlah Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan	3	lembaga
	15-Tersedianya Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP	01-Jumlah data dan informasi logistik hasil KP	2	data
	16-Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	01-Jumlah Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun	1	unit
	17-Tersedianya Sistem informasi pengelolaan gudang beku	01-Jumlah Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	1	unit
	18-Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku	01-Jumlah Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit)	242	unit
2360- Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	01-Terlaksananya Promosi Usaha dan Investasi	01-Jumlah Promosi Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan	3	promosi
	02-Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Usaha	01-Jumlah Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina	585	UMKM
		02-Jumlah UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program	500	UMKM
		03-Jumlah Startup Milennial yang difasilitasi dalam rangka kemudahan berusaha dan berinvestasi	8	UMKM
		04-Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA)	3545	UMKM
		05-Jumlah UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi Hulu Hilir	84	UMKM
	03-Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Usaha KP	01-Jumlah Lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya	35	lembaga

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		02-Jumlah Lembaga usaha berbasis Klaster Daya Saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	3	lembaga
	04-Terlaksananya Layanan Perizinan Usaha Pengolahan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Layanan Perizinan Usaha Pengolahan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	1	layanan
	05-Tersedianya Dokumen Peluang Investasi yang <i>Ready to offer</i>	01-Jumlah Dokumen Peluang Investasi yang <i>Ready to offer</i>	4	dokumen
2363- Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	01-Terkelolanya lahan garam	01-Lahan garam yang terfasilitasi	210	ha
	02-Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat	01-Sarana niaga garam rakyat yang direvitalisasi	11	unit
		02-Sarana dan/atau prasarana di kawasan garam terpadu yang dibangun	4	unit
	03-Terkelolanya Biofarmakologi	01-Sarana produksi biofarmakologi yang dibangun	2	unit
	04-Termanfaatkannya Pesisir dan Laut yang Dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut	01-Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut	3	lokasi
	06-Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT	01-Kawasan yang dibangun sarana prasarana Wisata Bahari	8	kawasan
		02-Kawasan BMKT yang teridentifikasi dan dikelola	2	kawasan
	07-Terfasilitasinya Pengelolaan Reklamasi dan Peizinan Perairan	01-Kawasan yang terfasilitasi pengelolaan reklamasi	5	lokasi
02-Kawasan yang terfasilitasi perizinan perairan		5	lokasi	
2365- Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	04-Terbangunnya Infrastruktur Kelautan dan Perikanan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	01-Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasaranannya	4	kawasan

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
	06-Terwujudnya Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Penguatan dan Perlindungannya	01-Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau - pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif)	3	komunitas
	10-Terkelolanya pulau - pulau kecil dan pulau - pulau kecil terluar	01-Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya	6	pulau
2366-Perencanaan Ruang Laut	01-Terwujudnya Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	01-Pemanfaatan Ruang Laut	40	lokasi
		02-Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang diselesaikan	34	Lokasi
	02-Terwujudnya Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Materi Teknis KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan	01-KSN dan KSNT yang Memiliki Materi Teknis KSN dan KSNT PPKT serta Rencana Zonasi KSNT Non PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	21	kawasan
	04-Terwujudnya Provinsi yang memiliki Dokumen monitoring evaluasi/kajian peninjauan kembali/peraturan turunan peraturan daerah rencana zonasi WP3K	01-Provinsi yang memiliki dokumen monitoring evaluasi/kajian peninjauan kembali/peraturan turunan peraturan daerah rencana zonasi WP3K	10	provinsi
	05-Terwujudnya Perairan laut antar wilayah yang memiliki Rencana Zonasi Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	01-Perairan laut antar wilayah yang memiliki Rencana Zonasi Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	2	perairan laut
3988-Karantina Ikan	01-Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif	01-Persentase kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan yang diselesaikan	90	persen
		02-Sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat	86	lokasi

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		invasif yang diidentifikasi		
		03-Persentase pencegahan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi	90	persen
		04-Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan <i>Biosecurity</i>	775	unit
		05-Persentase ikan dan hasil perikanan impor yang bebas penyakit Ikan karantina	100	persen
		06-Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100	persen
		07-Persentase Ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi standar persyaratan kesehatan ikan	98	persen
		08-Keberterimaan ikan dan hasil perikanan yang dijamin kesehatannya dinegara tujuan ekspor	125	negara
		09-Mitigasi risiko lalulintas hasil perikanan ekspor, impor dan antar area	4	dokumen
		10-Sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi	248	lokasi
		11-Jumlah dokumen harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri	8	dokumen
		12-Sarana pengawasan karantina	13	lokasi
		13-Prasarana pengawasan karantina	1	lokasi

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
3990- Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	01- Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	01- Jumlah parameter uji yang dihasilkan oleh laboratorium acuan (RSNI, validasi metode, uji profisiensi, kontrol positif, dan <i>rapid test</i>)	25	parameter
		02-Jumlah penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT BKIPM	35	parameter
		03-Jumlah unit kerja yang menerapkan metode pengujian tertentu sesuai standar	17	unit kerja
		04-Jumlah Unit kerja yang dapat melakukan pengujian Parameter <i>Destructive Fishing</i>	6	unit kerja
		05-Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan	74	persen
		06-Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (<i>Official Control</i>) Lingkup Otoritas Kompeten	20	unit kerja
		08-Jumlah Unit Pelaksana Teknis BKIPM yang terakreditasi menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025)	7	unit kerja
		09-Lokasi usaha perikanan yang menerapkan <i>quality assurance</i> sesuai standar, sistem dan regulasi	58	lokasi
		10-Inovasi pelayanan publik BKIPM yang lulus seleksi KIPP Menpan RB	1	unit kerja
		11-Nilai kepuasan Masyarakat berbasis digital terhadap Layanan BKIPM	84	nilai SKM unit

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		12-Jumlah parameter uji yang ditetapkan sebagai ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan	2	parameter
5747- Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	01-Terkelolanya Sistem Pakan dan Obat Ikan yang berkelanjutan	01-Peralatan/sarana pakan dan obat ikan yang disalurkan ke masyarakat	28	unit
		02-Pakan dan Obat Ikan yang disalurkan ke masyarakat dan operasional produksi di UPT	1.026.898	kg
		03-Sampel pakan ikan yang diuji	2.000	sampel
		04-Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) diterbitkan	125	lembaga
		05-Pakan dan Obat Ikan yang diregistrasi	200	produk
		06-Sarana pakan yang dikembangkan di Kampung Perikanan Budidaya	94	unit
		07-Kebijakan Tata Kelola Bidang Pakan dan Obat Ikan	8	rekomen-dasi kebijakan
		09-Prasarana Pakan dan Obat Ikan yang dikembangkan	5	unit
		6703- Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	01-Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	01-Jumlah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP
04-Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	01-Tersedianya Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan		3	unit
6704- Inkubasi Bisnis Kelautan dan Perikanan	01-Tersedianya usaha KP yang meningkat kapasitas usahanya	03-Jumlah NSPK Inkubasi Bisnis KP	4	NSPK

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
	02-Tersedianya Sarana Prasarana Inkubasi Bisnis Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Sarana Prasarana Inkubasi Bisnis Kelautan dan Perikanan	2	unit
6705-Pengujian Kelayakan Teknologi Kelautan dan Perikanan	03-Tersedianya Sarana Prasarana pengujian kelayakan teknologi Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Sarana Prasarana pengujian kelayakan teknologi Kelautan dan Perikanan	1	unit
6706-Analisis Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	01-Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah rekomendasi kebijakan antisipatif sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang dihasilkan	1	rekomendasi kebijakan
		02-Jumlah rekomendasi kebijakan responsif sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang dihasilkan	2	rekomendasi kebijakan
	03-Tersedianya kelompok masyarakat yang mendapat fasilitasi rekayasa sosial ekonomi kelautan dan perikanan	01-Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat fasilitasi rekayasa sosial ekonomi kelautan dan perikanan	1	kelompok masyarakat
	04-Tersedianya sarana prasarana sosial ekonomi kelautan dan perikanan	01-Jumlah sarana prasarana sosial ekonomi kelautan dan perikanan	0	unit

5. Program Dukungan Manajemen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2322-Legislati, Litigasi dan Kerjasama	01-Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang legislasi dan litigasi	01-Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Hukum	3,65	nilai
		02-Persentase Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	90	persen
		03-Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani	90	persen
		04-Persentase Legal Drafting Perjanjian Bidang Kelautan dan	90	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani		
		05-Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan (IK) <i>(Approved)</i>	80	nilai
		06-Indeks Kualitas Kebijakan	75	indeks
	02-Tata Kelola Pemerintahan yang baik di bidang kerja sama	01-Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama	90	persen
		02-Persentase Kerja Sama Antarlembaga yang Implementatif	75	persen
		03-Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	3,65	nilai
		04-Komponen Nilai RB KKP yang Menjadi Tanggung Jawab Biro Hukum	3,7	nilai
		05-Persentase Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	90	persen
		06-Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani	90	persen
		07-Persentase Legal Drafting Perjanjian Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani	90	persen
		08-Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan (IK) <i>(Approved)</i>	80	nilai
		09-Indeks Kualitas Kebijakan	75	indeks
2323-Pengelolaan	02-Tata Kelola Pemerintahan	01-Indeks Penerapan Sistem Merit	0,8	indeks

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
Organisasi dan SDM	Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur	02-Indeks Profesionalitas ASN KKP	80,11	indeks
		03-Nilai PM PRB Setjen	33	nilai
		04-Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggungjawab Biro SDMA	19,16	nilai
		05-Penetapan Penghargaan ASN bidang kelautan dan Perikanan tingkat Nasional	3	penghargaan
2325- Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	01-Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	01-Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan	14,05	nilai
		02-Nilai SAKIP KKP	83,5	nilai
		03-Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Perencanaan	74	indeks
		04-Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Keuangan	13,69	nilai
		05-Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Keuangan	74	indeks
	02-Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN	11-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	89	nilai
		12-Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Biro Umum dan PBJ	81	nilai
2328- Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	01-Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	01-Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan KKP melalui lembaga <i>stakeholder</i> lainnya	80	persen
		02-Persentase pemanfaatan koleksi Perpustakaan KKP oleh anggota Perpustakaan KKP	10	persen
		03-Nilai Keterbukaan Informasi Publik	90	nilai
		04-Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan	87	persen
		05-Nilai reformasi birokrasi KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Umum dan	1,46	nilai

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		Pengadaan Barang/Jasa		
		06-Variabel tingkat kematangan UKPBJ yang telah mencapai level proaktif	9	variabel
		07-Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa	75	persen
		08-Persentase paket yang dilakukan tender dibandingkan total paket yang diusulkan	98	persen
		09-Persentase pelaksanaan layanan pimpinan	86	persen
		10-Indeks kepuasan terhadap layanan kerumahtanggaan kantor pusat	83	persen
		11-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	89	nilai
		12-Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	81	nilai
2329- Pengelolaan Data dan Informasi	01-Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Data dan Informasi KP	01-Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Pusdatin	12,59	nilai
		02-Nilai Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	4	nilai
		03-Tingkat kepatuhan pengelolaan data Kelautan dan Perikanan	85	persen
		04-Indeks Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Aplikasi yang Dibangun dan Dikembangkan	3,9	indeks
		05-Nilai Mandiri Indeks Keamanan Informasi Berbasis IT	310	nilai
		06-Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	4	indeks
		07-Nilai Mutu Pelayanan Unit Kerja PTSP	82	nilai
2335- Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP	01-Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup Mitra	01-Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat	≤1	persen
		02-Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat	3	level

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		03-Unit Kerja Mitra Inspektorat Berpredikat Menuju WBK	78	unit
		04-Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat	32	nilai
		05-Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat	80	nilai
		06-Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat	81	persen
		07-Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat	81	persen
		08-Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat	81	persen
		09-Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat	75	persen
		10-Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat	18	rekomendasi
		11-Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat	88	persen
		12-Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Lingkup Inspektorat	80	persen
		13-Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat	100	persen
		14-Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat	100	persen
		15-Nilai Integritas KKP	76	nilai

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		16-Persentase Jumlah Rekomendasi Pengawasan Tujuan Tertentu yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja KKP	70	persen
		17-Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti Lingkup KKP	100	persen
2336-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal	01-Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal yang Optimal	01-Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Itjen KKP	≤1	persen
		02-Level Kapabilitas Itjen KKP	3	level
		03-Tingkat Maturitas SPIP Itjen KKP	3	level
		04-Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Itjen KKP	32	nilai
		05-Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Itjen KKP	80	nilai
		06-Indeks Profesionalitas ASN	79	indeks
		07-Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	87	persen
		08-Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP	85	persen
		09-Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	89	nilai
		10-Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP	87	nilai
		11-Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Itjen KKP	75	persen
		12-Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Itjen KKP	81	persen
		13-Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Itjen KKP	81	persen
		14-Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP	4,15	indeks
		15-Persentase Pengelolaan Data Hasil Pengawasan	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		Secara Tertib dan Handal		
		16-Persentase Publikasi Informasi dan Kinerja Pengawasan Intern KKP Secara Aktual	90	persen
		17-Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai Itjen KKP secara Tepat Waktu	100	persen
		18-Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran lingkup Itjen KKP	100	persen
		19-Persentase Pemenuhan Fasilitas Perkantoran Sesuai Kebutuhan Tahunan Itjen KKP	100	persen
2342-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	01-Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap bidang perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, dan data	01-Persentase pemenuhan dokumen bidang perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, dan data	100	persen
	02-Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap bidang keuangan, BMN dan umum	01-Persentase pemenuhan dokumen bidang keuangan, BMN dan umum	100	persen
	03-Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap bidang Hukum, Organisasi dan Kehumasan	01-Persentase pemenuhan dokumen bidang Hukum, Organisasi dan Kehumasan	100	persen
	04-Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap bidang SDM Aparatur	01-Persentase pemenuhan dokumen bidang SDM Aparatur	100	persen
2348-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	01-Terlaksananya Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	01-Nilai PM PRB DJPB	5	nilai
		02-Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PB	81	indeks
		04-Persentase Jumlah Ruang Lingkup Kerjasama yang Berhasil dilaksanakan Terhadap Jumlah Lingkup Kerjasama	90	persen
		05-Prosentase penyelesaian LHP BPK Satker Ditjen PB	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		06-Nilai Rekon Kinerja lingkup Ditjen PB	91	nilai
		07-Tingkat kepatuhan pengelolaan data Produksi PB	75	persen
		08-Persentase Jumlah Draft Peraturan Perundangan yang Terselesaikan dibandingkan dengan Usulan Program Penyusunan Peraturan Perundang undangan	70	persen
		09-Nilai Rata-rata hasil konsensus penilaian WBK Tahun 2021	76	nilai
		10-Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Budidaya	3,1	level
		11-Persentase unit kerja Ditjen PB yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	92	persen
		12-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PB	75	persen
		13-Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Perikanan Budidaya	89	nilai
		14-Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen Perikanan Budidaya	86	nilai
		15-Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan lingkup DJPB	12	bulan
		16-Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup DJPB	12	bulan
		17-Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Ditjen PB	77,5	persen
		18-Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PB	77,5	persen
2355-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan	01-Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	01-Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM PRB) lingkup Ditjen PSDKP	33	nilai
		02-Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna	80	indeks

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		layanan publik Ditjen. PSDKP		
		03-Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)	80	indeks
		04-Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan	80	indeks
		05-Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan)	80	indeks
		06-Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	70	indeks
		07-Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP	100	persen
		08-Unit Kerja Ditjen PSDKP Berpredikat Menuju WBK	12	unit
		09-Persentase pelaksanaan pengelolaan data IP ASN lingkup Ditjen PSDKP	100	persen
		10-Indeks Profesionalitas ASN lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP	77	indeks
		11-Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP	78	nilai
		12-Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis lingkup Ditjen PSDKP	83	persen
		13-Nilai PM SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP	87,5	nilai
		14-Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Ditjen PSDKP	90	nilai
		15-Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen PSDKP	100	persen
		16-Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21	nilai
		17-Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik	1	unit

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		18-Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP	<1	persen
		19-Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP	3	level
		20-Persentase pelaksanaan pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	100	persen
		21-Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Sekretariat Ditjen. PSDKP	77,5	persen
		22-Persentase pelaksanaan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	100	persen
		23-Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Sekretariat Ditjen. PSDKP	77,5	persen
		24-Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PSDKP	88	persen
		25-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP	75	persen
		26-Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit Eselon II lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	75	persen
		27-Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP	90	nilai
		28-Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP	88	nilai
2361-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen	02-Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya DJPDSPKP	01-Nilai PM PRB Ditjen PDS	33	nilai
		02-Indeks Profesionalitas ASN	75	indeks
		03-Unit Kerja yang Berpredikat Menuju	4	unit kerja

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan		Wilayah Bebas dari Korupsi			
		04-Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran (%)	≤1	persen	
		05-Nilai PM SAKIP	84,5	nilai	
		06-Nilai Maturitas SPIP	3	level	
		07-Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	88	persen	
		08-Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	75	persen	
		09-Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik	1	unit kerja	
		10-Nilai IKPA	90	nilai	
		11-Nilai NKA	88	nilai	
		12-Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PDSPKP	77.5	persen	
		13-Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup Ditjen PDSPKP	77.5	persen	
		14-Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP	77.5	persen	
		03-Terwujudnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup DJPDSPKP yang efisien, efektif dan berorientasi pada layanan prima	01-Persentase pemenuhan layanan internal/overhead lingkup DJPDSPKP	100	persen
		04-Terwujudnya pelaksanaan layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP yang efisien, efektif dan berorientasi pada layanan prima	01-Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Ditjen DJPDSPKP	12	bulan
2367-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen	01-Layanan Dukungan Manajemen Lingkup Ditjen PRL	01-Nilai PM PRB Ditjen PRL	35,5	nilai	
		02-Indeks Profesionalitas ASN	75	indeks	
		03-Unit Kerja yang Berpredikat Menuju	9	unit kerja	

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
Pengelolaan Ruang Laut		Wilayah Bebas dari Korupsi		
		04-Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran	<1	persen
		05-Nilai PM SAKIP	83,5	nilai
		06-Nilai Maturitas SPIP	3	level
		07-Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	88	persen
		08-Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	75	persen
		09-Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik	1	unit kerja
		10-Nilai IKPA	90	nilai
		11-Nilai NKA	88	nilai
		12-Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Ditjen PRL	12	bulan
2378- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	01-Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	01-Nilai PM PRB BRSDMKP	32	nilai
		02-Indeks Profesionalitas ASN	75	indeks
		03-Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	12	unit
		04-Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran	≤1	persen
		05-Nilai Penilaian Mandiri (PM) SAKIP	81,22	nilai
		06-Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	level
		07-Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	88	persen
		08-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja	75	persen
		09-Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik	1	unit kerja

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
		10-Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	89	nilai	
		11-Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	86	nilai	
		12-Persentase Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BRSDM	75	persen	
		13-Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BRSDM	75	persen	
			14-Pendidikan dan pelatihan aparatur	5.005	orang
		02-Terpeenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	01-Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekretariat BRSDMKP	1	layanan
			02-Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	0	layanan
		03-Terpeenuhinya Layanan Perkantoran	01-Jumlah Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lingkup BRSDMKP	12	bulan
			02-Jumlah Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup BRSDMKP	12	bulan
		3987-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	01-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	01-Nilai PM PRB BKIPM	32
02-Indeks Profesionalitas ASN	74			indeks	
03-Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	3			unit kerja	
04-Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran	≤1			persen	
05-Nilai PM SAKIP	85			nilai	
06-Nilai Maturitas SPIP	3			level	
07-Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	86			persen	
08-Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	70			persen	
09-Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik	1			unit kerja	
10-Nilai IKPA	89			nilai	

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		11-Nilai NKA	87	nilai
		12-Indeks Kualitas Kebijakan lingkup BKIPM	83	indeks
4345- Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	01-Jumlah Aparatur yang Dididik dan Dilatih	01-Jumlah Aparatur KKP yang Diberikan Beasiswa	190	orang
		02-Jumlah Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar	45	orang
		03-umlah Aparatur KKP yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan	4.770	orang
6453- Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	01-Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	01-Realisasi PNPB Badan Layanan Umum	60.943.935 .104	rupiah
		02-Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun Berjalan	660.000.000.000	rupiah
		03-Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih	5	persen
		04-Modernisasi BLU	100	persen
		05-Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP	93	nilai
		06-Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BLU LPMUKP	82	nilai
		07-Persentase Unit Kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup BLU LPMUKP	88	persen
		08-Persentase penyelesaian temuan BPK tahun 2022 lingkup BLU LPMUKP	100	persen
		09-Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP	75	persen
		10-Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran	86	persen

E. Dukungan terhadap Prioritas Nasional, Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*), dan Kegiatan Tematik

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka 6 (enam) PN dalam RKP tahun 2022 tetap dipertahankan hingga tahun 2024 dengan mengacu pada agenda pembangunan dalam RPJMN tahun 2020-2024.

RPJMN tahun 2020-2024 memuat 41 (empat puluh satu) proyek prioritas strategis (*major project*) dengan daya ungkit tinggi. Dalam RKP tahun 2023, jumlah *major project* dilakukan penajaman dan penambahan menjadi 45 (empat puluh lima) *major project*. RPJMN tahun

2020-2024 juga telah menetapkan *major project* sebagai fokus dalam penyusunan dan pendanaan RKP, dengan demikian maka beberapa *major project* direncanakan untuk langsung dikaitkan dan difokuskan dalam rangka mendukung tema RKP tahun 2023.

Kebijakan pengarusutamaan dalam RPJMN tahun 2020-2024, yakni gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial, dan transformasi digital akan diimplementasikan ke dalam beberapa kegiatan tematik pada tahun 2023. Pengarusutamaan pada beberapa kegiatan tematik bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

PN yang akan dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023 berdasarkan program adalah sebagai berikut:

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM
01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	032.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
	032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
	032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
	032.WA-Program Dukungan Manajemen
02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	032.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
	032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	032.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup
	032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
	032.WA-Program Dukungan Manajemen

Major project yang terkait langsung dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebanyak 3 (tiga) *major project* sebagai berikut:

MAJOR PROJECT	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)
04-Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2358-Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	004-Sarana Pasca Panen (MP Korporasi)
	032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2339-Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	002-Bantuan sarana pengembangan usaha nelayan (MP Korporasi)
			004-Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Meningkatkan Kapasitas Kelembagaannya (MP Korporasi)
		2346-Pengelolaan Produksi dan	001-Rekomendasi Bidang Lahan pembudidaya ikan yang akan disertipikasi

MAJOR PROJECT	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)
		Usaha Pembudidayaan Ikan	
			001-Sarana produksi dan usaha di Kampung Perikanan Budidaya yang dikembangkan (MP Korporasi)
			002-Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang dikembangkan (MP Korporasi)
		2356-Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	006-Mobil refrigerasi (MP korporasi)
06-Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2358-Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	005-Sarana Pasca Panen mendukung revitalisasi tambak
	032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2344-Pengelolaan Perbenihan Ikan	U02-Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat
			U03-Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat
			U07-Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat
			U08-Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat
		2345-Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	001-Kluster kawasan di Lokasi <i>Major Project</i> Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng
			001-Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disalurkan ke masyarakat
			002-Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)
			003-Infrastruktur budidaya udang berkelanjutan yang ditingkatkan
			U03-Sampel Surveilan Resistensi Antimikroba (AMR)/Surveilan Antimicrobial Use (AMU) yang diuji
		2356-Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	007-Mobil refrigerasi (berpendingin) mendukung revitalisasi tambak
07-Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2357-Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	001-Rekomendasi Kebijakan Pendampingan <i>Major Project</i> Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Pasar Ikan Bertaraf Internasional
	032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2338-Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	003-Kajian Rencana Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dan Bertaraf Internasional yang Disusun
			004-Pelabuhan Perikanan Terluar dan/atau

MAJOR PROJECT	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)
			Berwawasan Lingkungan yang Dikembangkan

Major project lain yang didukung oleh KKP adalah sebagai berikut:

MAJOR PROJECT	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)
01-Industri 4.0 di 6 Subsektor Prioritas	032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2357-Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	003-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional
		2358-Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	001-Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) yang diterbitkan
		5279-Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	001-UMKM yang Difasilitasi dalam Inkubator Bisnis
	032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2356-Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	001-Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan
2360-Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan		001-Promosi Usaha dan Investasi KP	
02-Destinasii Pariwisata Prioritas	032.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	2362-Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	003-Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan
	032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2363-Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	001-Sarana prasarana Wisata Bahari
14-PKSN Kawasan Perbatasan Negara	032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2338-Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	001-Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar
15-Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2357-Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	001-Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
			002-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh daerah
17-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	032.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2375-Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	001- Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih
26-Transformasi Digital	032.HB-Program	2360-Investasi dan	003- <i>Start Up Millenial</i>

MAJOR PROJECT	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)
	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Keberlanjutan Usaha Hasil KP	

Kegiatan tematik yang akan dilaksanakan KKP pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TEMATIK	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)
001-Anggaran Infrastruktur	032.WA-Program Dukungan Manajemen	2329-Pengelolaan Data dan Informasi	001-Aplikasi Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan
			001-OM Sarana Data Citra Satelit Radar
			002-Infrastruktur Teknologi Informasi Kelautan dan Perikanan
001-Anggaran Infrastruktur, 004-Mitigasi perubahan iklim, 007-Adaptasi perubahan iklim	032.WA-Program Dukungan Manajemen	2329-Pengelolaan Data dan Informasi	001-Sistem Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Terintegrasi yang Operasional
			002-Sarana Data Citra Satelit Radar
003-Anggaran Responsif Gender	032.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2375-Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	001-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih
			001-Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP
			002-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan
	032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2358-Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	002-Peralatan pengolahan ikan
			032.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup
	032.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	001-Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi
			001-Kawasan mangrove yang direhabilitasi
			001-Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2339-Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	002-Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove
			002-Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya
001-Sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat			
	2344-Pengelolaan Perbenihan Ikan	001-Sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat	
	2346-Pengelolaan Produksi dan Usaha	001-Sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat	

TEMATIK	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)
		Pembudidayaan Ikan	
		2350-Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	001-Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP
		2352-Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	001-Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan
		2356-Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	001-Kemitraan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan
		2360-Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	001-Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina
		2363-Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	001-Lahan Garam yang difasilitasi 003-Sarana niaga Garam Rakyat yang dibangun
		2365-Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	001-Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar 001-Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya
		3990-Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	001-Unit Kerja yang menerapkan standar pelayanan publik
		6704-Inkubasi Bisnis Kelautan dan Perikanan	001-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Inkubasi Bisnis Kelautan dan Perikanan
	032.WA-Program Dukungan Manajemen	2325-Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran
		2329-Pengelolaan Data dan Informasi	001-Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan
		2336-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal	996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan
		2355-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran 996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan
		6453-Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	001-UMKM yang Dilayani Permodalan BLU

TEMATIK	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)
003-Anggaran Responsif Gender, 000-Bukan Tematik	032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2358-Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	001-Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina
		5279-Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	001-Orang yang Menerima Diseminasi Diversifikasi Produk KP
	032.WA-Program Dukungan Manajemen	4345-Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan
003 - Anggaran Responsif Gender, 005-Anggaran Pendidikan	032.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2376-Pendidikan Kelautan dan Perikanan	001-Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten
003-Anggaran Responsif Gender, 008-Upaya Konvergensi Penanganan Stunting	032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2357-Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	001-Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
	032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	3990-Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	001-Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui Bulan Bakti Karantina Ikan dan Mutu
005-Anggaran Pendidikan	032.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2376-Pendidikan Kelautan dan Perikanan	001-Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya
			001-Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan Penerapan Ilmu Pengetahuan Atau Teknologi Pendidikan Tinggi
			001-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Kelautan dan Perikanan
			001-Peralatan dan Mesin Pendidikan KP
007-Adaptasi perubahan iklim	032.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	001-Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh
008-Upaya Konvergensi Penanganan Stunting	032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2357-Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	002-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh daerah

Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2023 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2023

MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
DJPT-DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP				
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
2337-Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan				
ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	002-Rekomendasi bahan standar, teknis dan desain sarana penangkapan ikan yang disusun	6	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
	003-Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang disusun	3	Rekomendasi Kebijakan	3.200.000
	004-Rekomendasi kebijakan pengelolaan permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan	1	Rekomendasi Kebijakan	500.000
ACA-Perizinan Produk	001-Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	4.500	Produk	9.147.550
ADC-Sertifikasi Produk	001-Sarana Penangkapan Ikan yang diuji dan disertifikasi	4	Produk	1.000.000
BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	2.770	Orang	6.134.322
BKB-Pemantauan produk	001-Bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau pemanfaatannya	49	laporan	500.000
FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina penerbitan dokumen kapal perikanannya	33	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.500.000
PCA-Perizinan Produk	001-Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	1.200	Produk	843.289
	002-Dokumen bukti lulus seleksi calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) awak kapal perikanan migran yang diterbitkan	15	Produk	208.800
PDI-Sertifikasi Profesi dan SDM	001-Awak kapal perikanan yang disertifikasi	26.100	Orang	3.696.550
	002-Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan	120	Orang	4.952.450

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha	13.500	Orang	934.535
QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Pelaku usaha yang difasilitasi penerapan prinsip HAM pada usaha perikanan	80	Badan usaha	149.376
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	002-Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan	15.000	Unit	18.750.000
	003-Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	1.100	Unit	22.990.000
2338-Pengelolaan Pelabuhan Perikanan				
BGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	001-Pelabuhan Perikanan yang dibina tata kelola dan operasionalnya sesuai standar	65	Lembaga	11.200.191
	002-Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	25	Lembaga	51.650.199
	004-Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya	68	Lembaga	13.100.000
CBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Pelabuhan Perikanan yang diidentifikasi rencana pembangunan/pengembangan fasilitasnya	25	Unit	6.950.000
FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina tata kelola dan operasional pelabuhan perikananannya	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.250.000
PDI-Sertifikasi Profesi dan SDM	001-Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	100	Orang	1.000.000
	002-Petugas mutu dan sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	100	Orang	600.000
QGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	001-Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar	12	Lembaga	7.200.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	31	Unit	70.407.420
	002-Pelabuhan perikanan UPT Daerah yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	39	Unit	62.950.000
	003-Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan	2	Unit	5.500.000
	004-Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan	4	Unit	18.100.000

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	001-Petugas Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan Terukur	541	Orang	7.901.000
2339-Pengelolaan Perizinan dan Kenyelanaan				
ACA-Perizinan Produk	001-Izin berusaha sub sektor penangkapan/pengangkutan ikan yang diterbitkan	5.400	Produk	2.000.000
BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Nelayan yang difasilitasi perlindungannya	34.000	Orang	28.846.149
FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Provinsi yang difasilitasi tata kelola perizinan perikanan tangkap	33	Provinsi	1.600.000
PCA-Perizinan Produk	001-Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	10.000	Produk	1.500.000
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	10.000	Orang	2.000.000
	002-Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	3.000	Orang	6.650.000
	003-Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	1.500	Orang	2.179.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	3.000	Kelompok Masyarakat	2.645.000
	002-Kampung nelayan yang difasilitasi penataannya	40	Kelompok Masyarakat	1.250.000
	004-Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Meningkatkan Kapasitas Kelembagaannya (MP Korporasi)	6	Kelompok Masyarakat	1.250.000
QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	001-Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/Kalaju)	100	Kelompok Masyarakat	78.125.000
	002-Bantuan sarana pengembangan usaha nelayan (MP Korporasi)	5	Kelompok Masyarakat	5.925.000
QKA-Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	001-Bidang tanah nelayan yang diidentifikasi untuk difasilitasi sertifikatnya	10.000	laporan	1.920.000
	002-Kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	300	laporan	255.000
	003-Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan	150.000	laporan	2.000.000
UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	34	Provinsi	4.200.000
2341-Pengelolaan Sumber Daya Ikan				
ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	001-Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Perairan Darat	3	Rekomendasi Kebijakan	2.476.500
	002-Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas	3	Rekomendasi Kebijakan	4.223.500

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
	003-Rekomendasi kebijakan alokasi SDI	11	Rekomendasi Kebijakan	1.400.000
BGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	001-Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat Yang Terbentuk	14	Lembaga	550.000
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	001-Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan	11	Rekomendasi Kebijakan	2.480.000
	002-Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan	3	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
	003-Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer diatas kapal perikanan	11	Rekomendasi Kebijakan	8.500.000
QGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	001-Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	11	Lembaga	2.700.000
QKB-Pemantauan produk	001-Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	15.000	laporan	1.500.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Prasarana Perikanan Tangkap Perairan Darat yang Dibangun/Ditingkatkan Fasilitasnya	2	Unit	2.000.000
	002-Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun	6	Unit	3.000.000
WA-Program Dukungan Manajemen				
2342-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap				
CAN-Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	955-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1	Unit	5.455.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	956-Layanan BMN	1	layanan	3.000.000
	957-Layanan Hukum	1	layanan	2.000.000
	958-Layanan Hubungan Masyarakat	1	layanan	4.200.000
	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	layanan	2.070.000
	962-Layanan Umum	1	layanan	1.000.000
	963-Layanan Data dan Informasi	1	layanan	12.289.980
	994-Layanan Perkantoran	1	layanan	360.000.000
EBB-Layanan dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	1	Unit	6.850.000
	971-Layanan Prasarana Internal	1	Unit	6.627.416

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	
EBC-Layanan Manajemen Internal	SDM	954-Layanan Manajemen SDM	1	layanan	4.907.820
EBD-Layanan Manajemen Internal	Kinerja	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	dokumen	12.950.000
		953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	dokumen	6.999.920
		955-Layanan Manajemen Keuangan	1	dokumen	18.011.432
		974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	dokumen	800.000
DJPB-DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA					
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan					
2344-Pengelolaan Perbenihan Ikan					
BAB-Pelayanan kepada lembaga	Publik	001-Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang diterbitkan	750	Lembaga	2.250.000
PBR-Kebijakan Pertanian dan Perikanan	Bidang	001-Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Perbenihan	10	Rekomendasi Kebijakan	9.120.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana		001-Sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat	429	Unit	66.100.000
		002-Unit Pembenihan Skala Kecil yang dibangun/direhabilitasi	8	Unit	1.600.000
		004-Sarana perbenihan di Kampung Perikanan Budidaya yang disalurkan ke masyarakat	32	Unit	16.917.500
QEL-Bantuan Hewan		U01-Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	54.195	Ekor	1.923.055
		U02-Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat	17.429	Ekor	940.329
		U03-Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	180	Ekor	18.000
		U04-Calon Induk Unggul Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	100	Ekor	15.385
		U05-Calon Induk Unggul ikan laut yang disalurkan ke masyarakat	170	Ekor	55.331
		U06-Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	27.120.944	Ekor	8.760.065
		U07-Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat	80.655.184	Ekor	3.952.104
		U08-Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	6.151.972	Ekor	1.421.106
		U09-Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	565.622	Ekor	380.098
		U10-Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	4.057.214	Ekor	22.039.341

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Calon Induk Unggul yang diproduksi	965.971	Unit	40.367.810
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	002-Pusat Produksi Benih dan Induk yang dikembangkan	3	Unit	8.000.000
	004-Percontohan Perbenihan Komoditas Unggulan	16	Unit	6.100.000
2345-Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan				
BJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit	U01-Sampel Residu Layanan UPT	1.650	Sampel	1.582.419
	U02-Sampel Kualitas Air Layanan UPT	21.813	Sampel	4.388.178
	U03-Sampel Patologi Layanan UPT	1.120	Sampel	644.672
	U04-Sampel Mikrobiologi Layanan UPT	4.857	Sampel	2.601.603
	U05-Sampel Biologi Molekuler Layanan UPT	3.303	Sampel	3.136.727
CDQ-OM Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-OM Prasarana produksi dan usaha budidaya	1	Unit	30.000.000
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	001-Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan	5	Rekomendasi Kebijakan	900.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	001-Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disalurkan ke masyarakat	3.915	Unit	128.400.000
QJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit	001-Sampel Monitoring Residu yang diuji	5.000	Sampel	12.500.000
	002-Sampel Monitoring Penyakit Ikan yang diuji	750	Sampel	1.500.000
	U03-Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMR) / Surveilans Antimicrobial Use (AMU) yang diuji	1.060	Sampel	932.712
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	18	Unit	10.750.000
	002-Sarana perikanan budidaya di UPT	6	Unit	6.577.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Kluster kawasan di Lokasi Major Project Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng	11	Unit	41.000.000
	002-Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)	55	Unit	16.500.000
	003-Infrastruktur budidaya udang berkelanjutan yang ditingkatkan	1	Unit	60.448.889
	004-Prasarana produksi perikanan budidaya di UPT	8	Unit	12.833.000
	006-Budidaya Udang Terintegrasi yang dibangun	5	Unit	33.600.000

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
	007-Kluster Kawasan Tambak Udang dan Bandeng di Lokasi Prioritas Lainnya	7	Unit	99.110.000
2346-Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan				
ACD-Perizinan Lembaga	001-Perizinan Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan	50	Institusi	250.000
BAB-Pelayanan Publik kepada lembaga	001-Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	7.500	Lembaga	11.250.000
CAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Sarana teknologi bidang produksi dan usaha pembesaran ikan yg diproduksi oleh UPT	15	Unit	5.500.000
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	001-Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Produksi dan Usaha	12	Rekomendasi Kebijakan	15.380.000
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Rekomendasi Bidang Lahan pembudidaya ikan yang akan disertifikasi	5.000	Orang	500.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002-Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang dikembangkan (MP Korporasi)	10	Kelompok Masyarakat	3.000.000
QEA-Bantuan Masyarakat	001-Bantuan Premi Asuransi Usaha Perikanan Budidaya yang disalurkan	5.000	Orang	4.500.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	001-Sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat	407	Unit	69.262.500
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Sarana produksi dan usaha di Kampung Perikanan Budidaya yang dikembangkan (MP Korporasi)	10	Unit	10.000.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Prasarana Produksi dan Usaha yang dikembangkan	6	Unit	2.400.000
5747-Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan				
ACA-Perizinan Produk	001-Pakan dan Obat Ikan diregistrasi	200	Produk	1.500.000
BAB-Pelayanan Publik kepada lembaga	001-Sertifikasi Pakan dan Obat Ikan yang diterbitkan	125	Lembaga	1.250.000
BJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit	U01-Sampel Nutrisi Pakan	1.011	Sampel	514.997
	U02-Sampel Obat Ikan	500	Sampel	310.036
	U03-Sampel Mutu Pakan	502	Sampel	475.993
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	001-Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Pakan dan Obat Ikan	8	Rekomendasi Kebijakan	1.440.000

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
QEG-Bantuan Peralatan / Sarana	001-Peralatan/sarana pakan dan obat ikan yang disalurkan ke masyarakat	28	Unit	4.900.000
	002-Sarana Pakan dan Obat Ikan di Kampung Perikanan Budidaya yang disalurkan ke masyarakat	94	Unit	17.965.200
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	1.026.898	Unit	13.144.300
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Prasarana pakan dan obat ikan yang dikembangkan	5	Unit	11.400.000
WA-Program Dukungan Manajemen				
2348-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya				
CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	80	Unit	2.800.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	956-Layanan BMN	1	layanan	700.000
	957-Layanan Hukum	1	layanan	1.300.000
	958-Layanan Hubungan Masyarakat	1	layanan	10.316.820
	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	layanan	1.000.000
	962-Layanan Umum	1	layanan	8.987.012
	963-Layanan Data dan Informasi	1	layanan	7.587.000
	994-Layanan Perkantoran	1	layanan	276.000.000
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	8	Unit	1.350.000
EBC-Layanan Manajemen Internal SDM	001-Layanan Manajemen SDM	1.260	Orang	6.200.000
EBD-Layanan Manajemen Internal Kinerja	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	dokumen	11.400.000
	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	dokumen	11.335.720
	955-Layanan Manajemen Keuangan	1	dokumen	10.349.960
PSDKP-DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
2350-Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan				
ACA-Perizinan Produk	001-Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	5.100	Produk	2.750.000
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Pemantauan dan Operasi Armada	4	NSPK	225.000
BKB-Pemantauan produk	011-Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang Dipantau	3	laporan	500.000
	012-Operasional Pembinaan POKMASWAS yang Dipantau	34	laporan	140.000
CBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Prasarana pengawasan SDKP pendukung yang dibangun	1	Unit	400.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	1.110	Kelompok Masyarakat	6.768.845
QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	001-Operasi Kapal Pengawas	90	Operasi	363.600.000
	002-Operasi Pesawat Patroli	150	Operasi	41.250.000
	003-Operasi Speedboat Pengawas	30	Operasi	15.400.000
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Kapal Pengawas	2	Unit	212.675.000
	002-Speedboat Pengawas	2	Unit	10.500.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	8	Unit	15.000.000
RCG-OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	124	Unit	81.500.000
RDS-OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001-Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	1	Unit	11.419.045
2351-Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan				
AEA-Koordinasi	001-Koordinasi Satgas Pemberantasan Illegal Fishing	1	kegiatan	500.000
	002-Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	18	kegiatan	3.122.859
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran	1	NSPK	150.000

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
BCE-Penanganan Perkara	U01-Perkara TPKP Sulit yang Ditangani	1	Perkara	106.050
	U02-Perkara TPKP Sedang yang Ditangani	29	Perkara	2.476.600
	U03-Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif	80	Perkara	1.600.000
BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Nelayan yang difasilitasi pemulungannya	30	Orang	190.500
	002-Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin	150	Orang	552.500
BKB-Pemantauan produk	001-Penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang dipantau	36	laporan	2.746.491
2352-Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan				
AEA-Koordinasi	001-Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan	4	kegiatan	2.000.000
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	5	NSPK	500.000
BCE-Penanganan Perkara	001-Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani	2	Perkara	1.335.000
BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	750	Orang	1.204.289
BIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	004-Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	135	Lembaga	561.000
BII-Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	001-Audit pemanfaatan ruang laut yang dilaporkan	5	laporan	500.000
BKB-Pemantauan produk	001-Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan yang dipantau	12	laporan	2.100.000
CAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan	8	Unit	246.501
FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan	5	Daerah (Prov/Kab/Kota)	500.000
QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001-Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	236	Lembaga	14.008.500
	002-Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	410	Lembaga	1.600.000
2353-Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan				

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
AEA-Koordinasi	001-Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	2	kegiatan	2.500.000
AEF-Sosialisasi dan Diseminasi	001-Sosialisasi dan Diseminasi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	500	Orang	1.000.000
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	3	NSPK	650.000
BKB-Pemantauan produk	005-Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan yang dipantau	12	laporan	3.700.000
FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan	5	Provinsi	500.000
QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	004-Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	2.442	Lembaga	16.521.820
WA-Program Dukungan Manajemen				
2355-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				
CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	167	Unit	1.675.268
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	956-Layanan BMN	1	layanan	1.749.528
	957-Layanan Hukum	1	layanan	833.559
	958-Layanan Hubungan Masyarakat	1	layanan	5.187.818
	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	layanan	965.063
	962-Layanan Umum	1	layanan	14.105.742
	963-Layanan Data dan Informasi	1	layanan	1.280.228
	969-Layanan Bantuan Hukum	1	layanan	399.192
	994-Layanan Perkantoran	1	layanan	268.263.731
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	478	Unit	6.802.529
EBC-Layanan Manajemen Internal SDM	954-Layanan Manajemen SDM	1.514	Orang	3.878.023
	996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	302	Orang	6.553.387
	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	layanan	5.030.733
	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	layanan	2.031.966

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	955-Layanan Manajemen Keuangan	1	layanan	4.741.059
	961-Layanan Reformasi Kinerja	1	layanan	4.765.905
DJPDSPKP-DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN				
EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				
2357-Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan				
BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Perizinan usaha Pemasaran bagi pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	1	layanan	650.000
BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Lembaga Pengelola Pasar Ikan yang dibina	100	Lembaga	1.300.000
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	001-Rekomendasi Kebijakan Pendampingan Major Project Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Pasar Ikan Bertaraf Internasional	1	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
PEB-Forum	001-Forum Perluasan Akses Pasar Negara Tujuan Ekspor	3	forum	1.500.000
PEH-Promosi	001-Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	185	promosi	33.300.000
	002-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh daerah	34	promosi	3.400.000
	003-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional	6	promosi	10.750.000
	004-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri	3	promosi	1.500.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	001-Peralatan Pemasaran	5.324	Unit	6.655.000
	002-Kendaraan Pemasaran Alih Teknologi Informasi	3	Unit	1.732.000
QMA-Data dan Informasi Publik	001-Profil Pasar Ekspor Hasil Kelautan Perikanan	4	Data	1.200.000
	002-Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan	3	Data	1.687.500
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Pasar Ikan	3	Unit	8.215.069
	002-Sentra Kuliner Ikan	2	Unit	5.390.500
UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Bursa Pasar Ikan	1	Sistem Informasi	1.100.000
2358-Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan				
ADA-Standarasi Produk	001-Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP	15	Produk	750.000
BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Pengolahan Hasil Perikanan	1	Data	1.200.000
	002-Profiling Industri pengolahan Hasil Perikanan (Losses dan Utilitas)	2	Data	1.200.000

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
PDC-Sertifikasi Produk	001-Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) yang diterbitkan	5.000	Produk	2.000.000
QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001-Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina	2.675	UMKM	8.793.000
QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	051-UPI skala menengah besar yang dibina	1.070	Industri	1.200.000
	052-Industri pengolahan yang dibina oleh daerah	3.070	Industri	3.400.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	001-Chest freezer	300	Unit	2.686.200
	002-Peralatan pengolahan ikan	315	Unit	8.385.300
	003-Sarana Pasca Panen	5	Unit	804.500
	004-Sarana Pasca Panen (MP Korporasi)	10	Unit	1.609.000
	005-Sarana Pasca Panen mendukung revitalisasi tambak	10	Unit	1.609.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu	2	Unit	9.000.000
	002-Pabrik Es	3	Unit	18.233.745
5279-Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan				
ADA-Standarisasi Produk	001-Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP	3	Produk	300.000
AEF-Sosialisasi dan Diseminasi	001-Orang yang Menerima Diseminasi Diversifikasi Produk KP	1.000	Orang	1.000.000
BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Sertifikasi Produk	1	layanan	1.125.000
	002-Layanan Pengujian Produk	1	layanan	1.200.000
QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001-UMKM yang Difasilitasi dalam Inkubator Bisnis	50	UMKM	3.500.000
	002-UMKM yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil KP	40	UMKM	1.200.000
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
2356-Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan				
ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	004-Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	1	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
AEE-Kemitraan	001-Kemitraan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan	18	Kesepakatan	900.000
	002-Kemitraan dalam rangka distribusi hasil perikanan	18	Kesepakatan	900.000

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen	1	layanan	500.000
BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan	3	Lembaga	1.000.000
BMA-Data dan Informasi Publik	051-Profil ketersediaan dan kebutuhan hasil KP	2	Data	1.467.500
QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Pengelola Gudang yang Difasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang	8	Lembaga	800.000
	003-Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok	8	Lembaga	1.700.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	001-Gudang Beku <i>Portable</i>	19	Unit	43.108.549
	002-Mobil refrigerasi (berpendingin)	21	Unit	18.296.607
	006-Mobil refrigerasi (MP korporasi)	2	Unit	1.742.730
	007-Mobil refrigerasi (berpendingin) mendukung revitalisasi tambak	3	Unit	2.613.600
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	051-Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan	242	Unit	1.208.408
RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001-Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan	1	Unit	2.000.000
	002-Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	1	Unit	225.496
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	003-Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	1	Unit	381.296
2360-Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan				
BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Perizinan usaha Pengolahan bagi pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	1	layanan	1.100.000
BMA-Data dan Informasi Publik	001-Dokumen Peluang Investasi yang <i>Ready to offer</i>	4	dokumen	1.000.000
PEH-Promosi	001-Promosi Usaha dan Investasi KP	3	promosi	2.850.000
QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya	35	Lembaga	1.312.500
	002-Klaster Daya Saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	3	Lembaga	1.000.000
QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001-Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina	585	UMKM	7.037.500
	002-UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program	500	UMKM	900.000
	003-Start Up Millennial	8	UMKM	1.000.000

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	
	004-Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA)	3.545	UMKM	6.450.000	
	005-UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi Hulu Hilir	84	UMKM	1.350.000	
WA-Program Dukungan Manajemen					
2361-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan					
CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	051-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Ditjen PDSPKP yang disediakan	69	Unit	1.148.758	
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	957-Layanan Hukum	1	layanan	1.000.000	
	958-Layanan Hubungan Masyarakat	3	layanan	3.200.000	
	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	layanan	1.050.000	
	962-Layanan Umum	2	layanan	4.900.000	
	963-Layanan Data dan Informasi	35	layanan	15.700.000	
	994-Layanan Perkantoran	2	layanan	89.658.200	
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	446	Unit	3.293.042	
EBC-Layanan Manajemen Internal SDM	954-Layanan Manajemen SDM	567	Orang	2.200.000	
EBD-Layanan Manajemen Internal Kinerja	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	36	layanan	9.180.000	
	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2	layanan	2.350.000	
	955-Layanan Manajemen Keuangan	4	layanan	3.400.000	
	961-Layanan Reformasi Kinerja	1	layanan	1.000.000	
PRL-DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT					
FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup					
2362-Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut					
PBW-Kebijakan Kemaritiman dan Kelautan	Bidang dan	001-Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	19	Rekomendasi Kebijakan	8.240.000
		002-Rekomendasi Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10	Rekomendasi Kebijakan	450.000
		003-Rekomendasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10	Rekomendasi Kebijakan	950.000

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
PEC-Kerja sama	001-Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	2	Kesepakatan	300.000
PEE-Kemitraan	001-Jejangin dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	5	Kesepakatan	1.000.000
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Dokumen NSPK Konservasi dan keanekaragaman Hayati Laut	8	NSPK	2.760.000
QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	001-Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	20	Kelompok Masyarakat	3.450.000
REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	002-Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Operasional	15.891.741	Hektar	15.520.000
	003-Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan	15.891.741	Hektar	3.900.000
REB-Konservasi Jenis/Spesies	001-Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	18	Jenis	4.180.000
	002-Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan	9	Jenis	10.400.000
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	001-Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya	80	Orang	1.400.000
UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	750.000
4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Dokumen NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4	NSPK	1.000.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	27	Kelompok Masyarakat	14.000.000
	002-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap resiko Bencana dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	2	Kelompok Masyarakat	910.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	002-Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove	10	Unit	2.000.000
RBH-Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	001-Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh	2	Unit	1.820.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4	Unit	1.800.000
	002-Prasarana Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15	Unit	9.475.000
	001-Kawasan mangrove yang direhabilitasi	100	Hektar	5.700.000

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	002-Vegetasi pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana	10	Hektar	1.800.000
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
2363-Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan				
ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	001-Rekomendasi Kebijakan/Perizinan Pemanfaatan pesisir dan laut untuk bangunan dan instalasi di laut	3	Rekomendasi Kebijakan	730.000
	002-Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perairan	5	Rekomendasi Kebijakan	900.000
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	051-Dokumen NSPK Jasa Kelautan	2	NSPK	200.000
PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	001-Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi	5	Rekomendasi Kebijakan	1.850.000
	002-Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	2	Rekomendasi Kebijakan	625.000
	003-Rekomendasi Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam	10	Rekomendasi Kebijakan	4.300.000
	004-Rekomendasi kebijakan pengelolaan wisata bahari dan BMKT	1	Rekomendasi Kebijakan	750.000
	005-Rekomendasi kebijakan pemanfaatan air laut	1	Rekomendasi Kebijakan	400.000
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Dokumen NSPK Jasa Kelautan	5	NSPK	5.200.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	001-Sarana prasarana Wisata Bahari	8	Unit	7.300.000
	002-Sarana prasarana BMKT	2	Unit	1.700.000
	003-Sarana niaga Garam Rakyat yang dibangun	13	Unit	29.700.000
	004-Sarana produksi biofarmakologi yang dibangun	2	Unit	2.315.000
RAI-Sarana Pengembangan Kawasan	001-Lahan Garam yang difasilitasi	210	Hektar	23.500.000
2365-Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				
ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	001-Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	3	Rekomendasi Kebijakan	925.000
	002-Rekomendasi Pulau-Pulau Keci/Terluar yang difasilitasi sertifikasinya	3	Rekomendasi Kebijakan	660.000
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Dokumen NSPK Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disusun dokumennya	1	NSPK	225.000
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1	NSPK	200.000

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	3	Kelompok Masyarakat	1.800.000
QEG-Bantuan Peralatan / Sarana	001-Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	55	Unit	6.325.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	3	Unit	9.200.000
RDQ-OM Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-OM Prasarana SKPT Pulau Morotai	0	Unit	0
2366-Perencanaan Ruang Laut				
PBT-Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	007-Rekomendasi kebijakan Pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut)	40	Rekomendasi Kebijakan	6.500.000
	008-Rekomendasi kebijakan pendelegasian kewenangan penerbitan persetujuan dan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	34	Rekomendasi Kebijakan	4.500.000
	009-Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	8	Rekomendasi Kebijakan	5.800.000
PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	001-Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	2	Rekomendasi Kebijakan	5.000.000
	002-Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN	4	Rekomendasi Kebijakan	3.000.000
	003-Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSNT yang berupa PPKT diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang KSN	14	Rekomendasi Kebijakan	3.500.000
	007-Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN	1	Rekomendasi Kebijakan	2.100.000
	008-Rekomendasi kebijakan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT Non PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	1	Rekomendasi Kebijakan	350.000
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Laut	4	NSPK	2.100.000
UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	003-Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.400.000
	004-Pemerintah Daerah yang dibina untuk pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	4	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.400.000
WA-Program Dukungan Manajemen				
2367-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut				

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001-Perangkat Pengolah Data dan Informasi	3	Unit	293.500
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	956-Layanan BMN	8	layanan	2.547.073
	957-Layanan Hukum	1	layanan	8.529.882
	958-Layanan Hubungan Masyarakat	6	layanan	6.948.070
	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	9	layanan	2.826.171
	962-Layanan Umum	5	layanan	7.575.507
	963-Layanan Data dan Informasi	14	layanan	2.778.336
	994-Layanan Perkantoran	1	layanan	142.000.000
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	13	Unit	422.838
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	954-Layanan Manajemen SDM	1.090	Orang	4.100.883
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	43	dokumen	5.111.165
	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	43	dokumen	3.995.908
	955-Layanan Manajemen Keuangan	43	dokumen	3.610.667
BRSDMKP-BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN				
DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				
2375-Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan				
ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	002-Inovasi yang diterapkan untuk Pelatihan Kelautan dan Perikanan	13	Kajian	1.017.156
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	9	NSPK	2.030.000
BDJ-Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	001-Usaha Rintisan/ Startup Kelautan dan Perikanan	8	Start Up	4.000.000
DCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	001-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	1.800	Orang	745.200
	001-Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	47.000	Kelompok Masyarakat	76.950.000

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan	16	Kelompok Masyarakat	8.000.000
QJA-Penyidikan dan Pengujian Produk	001-Teknologi Kelautan dan Perikanan yang diuji Kelayakannya	3	Produk	1.500.000
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Peralatan dan Mesin Pelatihan dan Penyuluhan KP	6	Unit	4.794.502
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	Unit	1.440.000
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	001- Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih	31.490	Orang	27.989.152
2376-Pendidikan Kelautan dan Perikanan				
ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	001-Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan	20	Kajian	1.800.000
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Kelautan dan Perikanan	5	NSPK	1.000.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan Penerapan Ilmu Pengetahuan Atau Teknologi Pendidikan Tinggi	13	Kelompok Masyarakat	1.243.338
RAA-Sarana Bidang Pendidikan	001-Peralatan dan Mesin Pendidikan KP	2	Unit	8.734.920
RBJ-Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	001-Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Unit	39.199.519
SAC-Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	001-Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	8.291	Orang	146.857.163
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
6703-Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan				
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	11	NSPK	2.350.000

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001-Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	3	Unit	450.000
6704-Inkubasi Bisnis Kelautan dan Perikanan				
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Inkubasi Bisnis Kelautan dan Perikanan	4	NSPK	900.000
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Sarana Inkubasi Bisnis Perikanan	2	Unit	1.423.250
6705-Pengujian Kelayakan Teknologi Kelautan dan Perikanan				
CAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Sarana Pengujian Kelayakan Teknologi Kelautan dan Perikanan	1	Unit	250.000
KB-Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				
2428-Riset Kelautan				
RCG-OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-OM Sarana Riset Data Citra Satelit Radar	0	Unit	0
WA-Program Dukungan Manajemen				
2378-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan				
CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001-Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Riset dan SDM KP	2	Unit	460.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	956-Layanan BMN	11	layanan	2.126.688
	957-Layanan Hukum	1	layanan	600.000
	958-Layanan Hubungan Masyarakat	96	layanan	6.860.652
	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5	layanan	820.000
	962-Layanan Umum	48	layanan	10.097.894
	963-Layanan Data dan Informasi	8	layanan	1.603.950
	994-Layanan Perkantoran	43	layanan	989.462.966

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	2	Unit	1.200.000
	971-Layanan Prasarana Internal	1	Unit	1.200.000
EBC-Layanan Manajemen Internal	954-Layanan Manajemen SDM	683	Orang	3.382.686
EBD-Layanan Manajemen Internal	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	48	dokumen	7.708.324
	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	60	dokumen	7.096.373
	955-Layanan Manajemen Keuangan	47	dokumen	5.941.893
	974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	5	dokumen	781.540
FAB-Sistem Pemerintahan	001-Sistem Informasi Pemerintahan Bidang Riset dan SDM KP	2	Sistem Informasi	120.000
4345-Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP				
BKIPM-BADAN KARANTINA IKAN DAN PENGENDALIAN MUTU KEAMANAN HASIL PERIKANAN				
EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				
3989-Pengendalian Mutu				
ABR-Kebijakan Pertanian dan Perikanan	009-Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	28	Rekomendasi Kebijakan	4.575.000
ADF-Sertifikasi Lembaga	001-Sertifikasi CPIB pada suplier hasil perikanan	300	Lembaga	2.900.000
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Sistem Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan	1	NSPK	200.000
BIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	001-Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	46	Produk	1.500.000
PDC-Sertifikasi Produk	001-Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	2.900	Produk	3.000.000
QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	001-Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	80	Produk	4.000.000
QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001- Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	250	Lembaga	950.000
	002-UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1.080	Lembaga	5.850.000

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Sarana Pengujian Mutu	12	Unit	12.000.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Prasarana Pengujian Mutu	1	Unit	300.000
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
3988-Karantina Ikan				
ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	001-Rekomendasi Kebijakan Peta Lokasi Sebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK)	248	Rekomendasi Kebijakan	3.400.000
	002-Rekomendasi Kebijakan Peta Lokasi Sebaran Jenis Ikan yang Dilarang, Bersifat Invasif	86	Rekomendasi Kebijakan	1.200.000
	003-Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Perkarantina dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri	8	Rekomendasi Kebijakan	400.000
	004-Rekomendasi Kebijakan mitigasi resiko lalulintas hasil perikanan	8	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000
PDC-Sertifikasi Produk	001-Sertifikat karantina ekspor, impor dan domestik	250.000	Produk	12.400.000
PDF-Sertifikasi Lembaga	001-Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity	775	Lembaga	3.400.000
QCE-Penanganan Perkara	001-Perkara pelanggaran peraturan perkarantina ikan yang di selesaikan	80	Perkara	2.000.000
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Sarana pengawasan karantina	13	Unit	8.400.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001-Prasarana pengawasan karantina	1	Unit	1.250.000
3990-Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
ADD-Standardisasi Lembaga	001-Unit Kerja yang menerapkan standar pelayanan publik	47	Lembaga	2.000.000
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK standarisasi sistem dan kepatuhan Perkarantina ikan dan mutu hasil perikanan	1	NSPK	200.000
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	001-Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	35	Rekomendasi Kebijakan	5.000.000
	002-Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan	25	Rekomendasi Kebijakan	2.400.000

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
PDD-Standarisasi Lembaga	001-Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian	23	Lembaga	1.400.000
	002-Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen	47	Lembaga	2.775.000
	003-Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan	20	Lembaga	700.000
	004-Unit kerja wilayah perbatasan yang telah menerapkan standar pelayanan mutu dan karantina	41	Lembaga	1.200.000
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui Bulan Bakti Karantina Ikan dan Mutu	6.050	Orang	9.350.000
QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	001-USaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	58	laporan	3.100.000
WA-Program Dukungan Manajemen				
3987-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan				
CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001-Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup BKIPM	15	Unit	3.200.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	956-Layanan BMN	1	layanan	900.000
	957-Layanan Hukum	1	layanan	1.000.000
	958-Layanan Hubungan Masyarakat	1	layanan	2.000.000
	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	layanan	1.500.000
	962-Layanan Umum	1	layanan	9.900.000
	963-Layanan Data dan Informasi	1	layanan	1.700.000
	969-Layanan Bantuan Hukum	1	layanan	55.000
	994-Layanan Perkantoran	1	layanan	389.500.000
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	1	Unit	1.345.000
	971-Layanan Prasarana Internal	1	Unit	500.000
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	954-Layanan Manajemen SDM	1.870	Orang	3.400.000
	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	dokumen	7.000.000
	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	dokumen	1.750.000

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	955-Layanan Manajemen Keuangan	1	dokumen	1.300.000
	974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	dokumen	600.000
SETJEN-SEKRETARIAT JENDERAL				
WA-Program Dukungan Manajemen				
2322-Legislati, Litigasi dan Kerjasama				
AEC-Kerja sama	002-Kesepakatan Kerja Sama Antar Lembaga	3	Kesepakatan	3.687.239
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	957-Layanan Hukum	4	layanan	7.910.670
	969-Layanan Bantuan Hukum	1	layanan	2.307.976
PEC-Kerja sama	001-Kerjasama Internasional bidang Kelautan dan Perikanan	2	dokumen	6.500.000
2323-Pengelolaan Organisasi dan SDM				
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3	layanan	1.500.000
EBC-Layanan Manajemen Internal SDM	954-Layanan Manajemen SDM	12	layanan	13.283.782
2325-Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN				
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	956-Layanan BMN	4	layanan	2.814.610
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	41	dokumen	27.536.094
	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4	dokumen	9.014.126
	955-Layanan Manajemen Keuangan	41	dokumen	9.113.551
2328-Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum				
CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001-Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup Setjen	199	Unit	6.388.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	958-Layanan Hubungan Masyarakat	6	layanan	17.853.765
	959-Layanan Protokoler	2	layanan	29.947.399
	962-Layanan Umum	16	layanan	51.893.648
	994-Layanan Perkantoran	2	layanan	262.900.715
	951-Layanan Sarana Internal	3	Unit	19.291.861

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal	1	Unit	14.400.000
2329-Pengelolaan Data dan Informasi				
BMA-Data dan Informasi Publik	001-Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	39	layanan	9.565.641
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	layanan	4.261.163
FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Aplikasi Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan	3	Sistem Informasi	3.000.000
	002-Infrastruktur Teknologi Informasi Kelautan dan Perikanan	3	layanan	3.790.101
RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001-Sistem Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Terintegrasi yang Operasional	1	Unit	87.751.834
	002-Sarana Data Citra Satelit Radar	1	Unit	20.970.230
RCL-OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001-OM Sarana Data Citra Satelit Radar	1	Unit	5.300.000
6453-Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan				
BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001-UMKM yang Dilayani Permodalan BLU	5.964	UMKM	10.984.600
BIF-Pengawasan dan Pengendalian Layanan	001-Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha	1	layanan	3.557.726
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	layanan	38.855.655
	994-Layanan Perkantoran	1	layanan	500.250
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	10	Unit	200.000
FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001-Laporan Pengelolaan Keuangan	1	laporan	954.700
	002-Laporan Pengawasan Internal Pengelolaan Modal Modal Usaha	1	laporan	576.100
	003-Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Dana Bergulir	1	laporan	1.545.965
ITJEN-INSPEKTORAT JENDERAL				
WA-Program Dukungan Manajemen				
2335-Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP				

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	dokumen	247.575
	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	dokumen	714.043
	955-Layanan Manajemen Keuangan	1	dokumen	396.667
	961-Layanan Reformasi Kinerja	1	dokumen	120.960
	965-Layanan Audit Internal	7	dokumen	37.022.418
	974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	dokumen	85.127
2336-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal				
CAN-Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	001-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	29	Unit	571.928
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	956-Layanan BMN	1	layanan	125.802
	957-Layanan Hukum	1	layanan	197.482
	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	layanan	214.725
	962-Layanan Umum	1	layanan	336.881
	963-Layanan Data dan Informasi	1	layanan	952.450
	994-Layanan Perkantoran	1	layanan	40.532.420
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	122	Unit	1.585.721
EBC-Layanan Manajemen Internal	954-Layanan Manajemen SDM	225	Orang	416.624
	996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	225	Orang	1.790.494
				6.767.656.876

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
secara elektronik

Effin Martiana

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2023

RINCIAN MAJOR PROJECT DAN PRIORITAS NASIONAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023

A. MAJOR PROJECT

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (Rp. 000)
01-Industri 4.0 di 6 Subsektor Prioritas	
06-Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
2357-Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	
PEH-Promosi	
003-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional	10.750.000
2358-Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	
PDC-Sertifikasi Produk	
001-Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)/Sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) yang diterbitkan	2.000.000
5279-Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	
QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	
001-UMKM yang Difasilitasi dalam Inkubator Bisnis	3.500.000
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2356-Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	
RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001-Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan	2.000.000
2360-Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	
PEH-Promosi	
001-Promosi Usaha dan Investasi KP	2.850.000
02-Destinasii Pariwisata Prioritas	
07-Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	
032.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	
2362-Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	
REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	
003-Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan	3.900.000
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2363-Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Sarana prasarana Wisata Bahari	7.300.000
04-Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	
03-Ditjen Perikanan Tangkap	
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2339-Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
004-Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Meningkatkan Kapasitas Kelembagaannya (MP Korporasi)	1.250.000
005-Kelembagaan usaha nelayan yang dikembangkan sebagai korporasi nelayan	0
QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (Rp. 000)
002-Bantuan sarana pengembangan usaha nelayan (MP Korporasi)	5.925.000
003-Bantuan Pengembangan Sarana (Korporasi Nelayan)	0
004-Sarana Pengolah Data yang disalurkan (Korporasi Nelayan)	0
04-Ditjen Perikanan Budidaya	
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2346-Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Rekomendasi Bidang Lahan pembudidaya ikan yang akan disertifikasi	500.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
002-Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang dikembangkan (MP Korporasi)	3.000.000
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Sarana produksi dan usaha di Kampung Perikanan Budidaya yang dikembangkan (MP Korporasi)	10.000.000
06-Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
2358-Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
004-Sarana Pasca Panen (MP Korporasi)	1.609.000
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2356-Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
006-Mobil refrigerasi (MP korporasi)	1.742.730
06-Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	
04-Ditjen Perikanan Budidaya	
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2344-Pengelolaan Perbenihan Ikan	
QEL-Bantuan Hewan	
U02-Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat	940.329
U03-Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	18.000
U07-Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat	
U08-Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	1.421.106
2345-Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disalurkan ke masyarakat	128.400.000
QJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit	
U03-Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMR)/ <i>Surveilans Antimicrobial Use</i> (AMU) yang diuji	932.712
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Kluster kawasan di Lokasi Major Project Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng	41.000.000
002-Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)	16.500.000
003-Infrastruktur budidaya udang berkelanjutan yang ditingkatkan	60.448.889
06-Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
2358-Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
005-Sarana Pasca Panen mendukung revitalisasi tambak	1.609.000
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2356-Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	
QEG-Bantuan Peralatan / Sarana	

UNIT ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (Rp. 000)
007-Mobil refrigerasi (berpendingin) mendukung revitalisasi tambak	
07-Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	
03-Ditjen Perikanan Tangkap	
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2337-Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	
QEG-Bantuan Peralatan / Sarana	
001-Kapal perikanan bantuan yang tersalurkan	0
002-Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan	18.750.000
003-Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	22.990.000
2338-Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
003-Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan	5.500.000
2341-Pengelolaan Sumber Daya Ikan	
QGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	
001-Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	2.700.000
06-Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
2357-Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Kebijakan Pendampingan Major Project Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Pasar Ikan Bertaraf Internasional	1.000.000
14-PKSN Kawasan Perbatasan Negara	
03-Ditjen Perikanan Tangkap	
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2338-Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	
QGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	
001-Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar	7.200.000
15-Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	
06-Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
2357-Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	
PEH-Promosi	
001-Kampanye Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan)	33.300.000
002-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh daerah	3.400.000
17-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	
12-Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	
032.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	
2375-Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001- Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih	27.989.152
26-Transformasi Digital	
06-Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2360-Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	
QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	
003-Start Up Millenial	1.000.000
Total	437.991.622

B. PRIORITAS NASIONAL

PN/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP)
01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	
01-Sekretariat Jenderal	
032.WA-Program Dukungan Manajemen	
2329-Pengelolaan Data dan Informasi	
RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001-Sistem Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Terintegrasi yang Operasional	87.751.834
002-Sarana Data Citra Satelit Radar	20.970.230
RCL-OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001-OM Sarana Data Citra Satelit Radar	5.300.000
03-Ditjen Perikanan Tangkap	
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2337-Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	
PCA-Perizinan Produk	
001-Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	843.289
002-Dokumen bukti lulus seleksi calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) awak kapal perikanan migran yang diterbitkan	208.800
PDI-Sertifikasi Profesi dan SDM	
001-Awak kapal perikanan yang disertifikasi	3.696.550
002-Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan	4.952.450
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha	934.535
QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	
001-Pelaku usaha yang difasilitasi penerapan prinsip HAM pada usaha perikanan	149.376
QEG-Bantuan Peralatan / Sarana	
001-Kapal perikanan bantuan yang tersalurkan	-
002-Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan	18.750.000
003-Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	22.990.000
2338-Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	
PDI-Sertifikasi Profesi dan SDM	
001-Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	1.000.000
002-Petugas mutu dan sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	600.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	70.407.420
002-Pelabuhan perikanan UPT Daerah yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	62.950.000
003-Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan	5.500.000
004-Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan	18.100.000
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Petugas Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan Terukur	7.901.000

PN/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP)
2339-Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	
PCA-Perizinan Produk	
001-Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	1.500.000
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	2.000.000
002-Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	6.650.000
003-Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	2.179.000
005-Bidang tanah nelayan yang diidentifikasi untuk difasilitasi sertifikatnya	-
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	2.645.000
002-Kampung nelayan yang difasilitasi penataannya	1.250.000
004-Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Meningkatkan Kapasitas Kelembagaannya (MP Korporasi)	1.250.000
005-Kelembagaan usaha nelayan yang dikembangkan sebagai korporasi nelayan	-
010-Kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	-
QEA-Bantuan Masyarakat	
002-Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang disalurkan	-
QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	
001-Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/Kalaju)	78.125.000
002-Bantuan sarana pengembangan usaha nelayan (MP Korporasi)	5.925.000
003-Bantuan Pengembangan Sarana (Korporasi Nelayan)	-
004-Sarana Pengolah Data yang disalurkan (Korporasi Nelayan)	-
QKA-Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	
001-Bidang tanah nelayan yang diidentifikasi untuk difasilitasi sertifikatnya	1.920.000
002-Kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	255.000
003-Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan	2.000.000
004-Kelompok nelayan yang diidentifikasi kampung nelayannya untuk difasilitasi penataannya	-
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Sarana penunjang pemungutan PNB perikanan tangkap yang disediakan	-
UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
001-Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	4.200.000
2341-Pengelolaan Sumber Daya Ikan	
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan	2.480.000
002-Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan	1.000.000
003-Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer diatas kapal perikanan	8.500.000
QGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	

PN/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP)
001-Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	2.700.000
QKB-Pemantauan produk	
001-Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	1.500.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Prasarana Perikanan Tangkap Perairan Darat yang Dibangun/Ditingkatkan Fasilitasnya	2.000.000
002-Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun	3.000.000
04-Ditjen Perikanan Budidaya	
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2344-Pengelolaan Perbenihan Ikan	
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Perbenihan	9.120.000
QEG-Bantuan Peralatan / Sarana	
001-Sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat	66.100.000
002-Unit Pembenuhan Skala Kecil yang dibangun/direhabilitasi	1.600.000
004-Sarana perbenihan di Kampung Perikanan Budidaya yang disalurkan ke masyarakat	16.917.500
QEL-Bantuan Hewan	
U01-Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	1.923.055
U02-Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat	940.329
U03-Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	18.000
U04-Calon Induk Unggul Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	15.385
U05-Calon Induk Unggul ikan laut yang disalurkan ke masyarakat	55.331
U06-Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	8.760.065
U07-Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat	3.952.104
U08-Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	1.421.106
U09-Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	380.098
U10-Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	22.039.341
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Calon Induk Unggul yang diproduksi	40.367.810
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
002-Pusat Produksi Benih dan Induk yang dikembangkan	8.000.000
004-Percontohan Perbenihan Komoditas Unggulan	6.100.000
2345-Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan	900.000
QEG-Bantuan Peralatan / Sarana	
001-Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disalurkan ke masyarakat	128.400.000

PN/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP)
QJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit	
001-Sampel Monitoring Residu yang diuji	12.500.000
002-Sampel Monitoring Penyakit Ikan yang diuji	1.500.000
U03-Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMR) / <i>Surveilans Antimicrobial Use</i> (AMU) yang diuji	932.712
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	10.750.000
002-Sarana perikanan budidaya di UPT	6.577.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Kluster kawasan di Lokasi Major Project Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng	41.000.000
002-Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)	16.500.000
003-Infrastruktur budidaya udang berkelanjutan yang ditingkatkan	60.448.889
004-Prasarana produksi perikanan budidaya di UPT	12.833.000
006-Budidaya Udang Terintegrasi yang dibangun	33.600.000
007-Kluster Kawasan Tambak Udang dan Bandeng di Lokasi Prioritas Lainnya	99.110.000
2346-Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Produksi dan Usaha	15.380.000
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Rekomendasi Bidang Lahan pembudidaya ikan yang akan disertifikasi	500.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
002-Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang dikembangkan (MP Korporasi)	3.000.000
QEA-Bantuan Masyarakat	
001-Bantuan Premi Asuransi Usaha Perikanan Budidaya yang disalurkan	4.500.000
QEG-Bantuan Peralatan / Sarana	
001-Sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat	69.262.500
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Sarana produksi dan usaha di Kampung Perikanan Budidaya yang dikembangkan (MP Korporasi)	10.000.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Prasarana Produksi dan Usaha yang dikembangkan	2.400.000
5747-Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Pakan dan Obat Ikan	1.440.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Peralatan/sarana pakan dan obat ikan yang disalurkan ke masyarakat	4.900.000
002-Sarana Pakan dan Obat Ikan di Kampung Perikanan Budidaya yang disalurkan ke masyarakat	17.965.200
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	13.144.300

PN/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP)
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Prasarana pakan dan obat ikan yang dikembangkan	11.400.000
05-Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2353-Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	
QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	
004-Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	16.521.820
06-Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
2357-Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Kebijakan Pendampingan <i>Major Project</i> Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Pasar Ikan Bertaraf Internasional	1.000.000
PEB-Forum	
001-Forum Perluasan Akses Pasar Negara Tujuan Ekspor	1.500.000
PEH-Promosi	
003-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional	10.750.000
004-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri	1.500.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Peralatan Pemasaran	6.655.000
002-Kendaraan Pemasaran Alih Teknologi Informasi	1.732.000
QMA-Data dan Informasi Publik	
001-Profil Pasar Ekspor Hasil Kelautan Perikanan	1.200.000
002-Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan	1.687.500
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Pasar Ikan	8.215.069
002-Sentra Kuliner Ikan	5.390.500
UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	
001-Bursa Pasar Ikan	1.100.000
2358-Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	
PDC-Sertifikasi Produk	
001-Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)/Sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) yang diterbitkan	2.000.000
QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	
001-Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina	8.793.000
QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	
051-UPI skala menengah besar yang dibina	1.200.000
052-Industri pengolahan yang dibina oleh daerah	3.400.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001- <i>Chest freezer</i>	2.686.200

PN/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP)
002-Peralatan pengolahan ikan	8.385.300
003-Sarana Pasca Panen	804.500
004-Sarana Pasca Panen (MP Korporasi)	1.609.000
005-Sarana Pasca Panen mendukung revitalisasi tambak	1.609.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu	9.000.000
002-Pabrik Es	18.233.745
5279-Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	
QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	
001-UMKM yang Difasilitasi dalam Inkubator Bisnis	3.500.000
002-UMKM yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil KP	1.200.000
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2356-Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	
QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	
002-Pengelola Gudang yang Difasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang	800.000
003-Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok	1.700.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Gudang Beku Portable	43.108.549
002-Mobil refrigerasi (berpendingin)	18.296.607
006-Mobil refrigerasi (MP korporasi)	1.742.730
007-Mobil refrigerasi (berpendingin) mendukung revitalisasi tambak	2.613.600
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
051-Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan	1.208.408
RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001-Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan	2.000.000
002-Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	225.496
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
003-Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	381.296
2360-Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	
PEH-Promosi	
001-Promosi Usaha dan Investasi KP	2.850.000
QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	
001-Lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya	1.312.500
002-Klaster Daya Saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	1.000.000
QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	
001-Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina	7.037.500

PN/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP)
002-UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program	900.000
003-Start Up Millennial	1.000.000
004-Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA)	6.450.000
005-UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi Hulu Hilir	1.350.000
07-Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2363-Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	
PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
001-Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi	1.850.000
002-Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	625.000
003-Rekomendasi Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam	4.300.000
004-Rekomendasi kebijakan pengelolaan wisata bahari dan BMKT	750.000
005-Rekomendasi kebijakan pemanfaatan air laut	400.000
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Dokumen NSPK Jasa Kelautan	5.200.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Sarana prasarana Wisata Bahari	7.300.000
002-Sarana prasarana BMKT	1.700.000
003-Sarana niaga Garam Rakyat yang dibangun	29.700.000
004-Sarana produksi biofarmakologi yang dibangun	2.315.000
RAI-Sarana Pengembangan Kawasan	
001-Lahan Garam yang difasilitasi	23.500.000
2366-Perencanaan Ruang Laut	
PBT-Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	
007-Rekomendasi kebijakan Pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut)	6.500.000
008-Rekomendasi kebijakan pendelegasian kewenangan penerbitan persetujuan dan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	4.500.000
009-Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	5.800.000
PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
001-Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	5.000.000
002-Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN	3.000.000
003-Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSNT yang berupa PPKT diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang KSN	3.500.000
007-Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN	2.100.000
008-Rekomendasi kebijakan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT Non PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	350.000
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Laut	2.100.000
UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	

PN/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP)
003-Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi	3.400.000
004-Pemerintah Daerah yang dibina untuk pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	2.400.000
12-Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	
032.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	
2375-Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	76.950.000
002-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan	8.000.000
QJA-Penyidikan dan Pengujian Produk	
001-Teknologi Kelautan dan Perikanan yang diuji Kelayakannya	1.500.000
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Peralatan dan Mesin Pelatihan dan Penyuluhan KP	4.794.502
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.440.000
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001- Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih	27.989.152
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
6703-Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	
RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001-Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	450.000
6704-Inkubasi Bisnis Kelautan dan Perikanan	
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Sarana Inkubasi Bisnis Perikanan	1.423.250
032.KB-Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	
2428-Riset Kelautan	
RCG-OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
001-OM Sarana Riset Data Citra Satelit Radar	-
13-Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	
032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
3989-Pengendalian Mutu	
PDC-Sertifikasi Produk	
001-Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	3.000.000
QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	
001-Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	4.000.000
QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	
001- Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i>	950.000
002-UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	5.850.000
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Sarana Pengujian Mutu	12.000.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	

PN/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP)
001-Prasarana Pengujian Mutu	300.000
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
3988-Karantina Ikan	
PDC-Sertifikasi Produk	
001-Sertifikat karantina ekspor, impor dan domestik	12.400.000
PDF-Sertifikasi Lembaga	
001-Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity	3.400.000
QCE-Penanganan Perkara	
001-Perkara pelanggaran peraturan perkarantinaan ikan yang di selesaikan	2.000.000
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Sarana pengawasan karantina	8.400.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Prasarana pengawasan karantina	1.250.000
3990-Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	5.000.000
002-Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan	2.400.000
PDD-Standardisasi Lembaga	
001-Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian	1.400.000
002-Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen	2.775.000
003-Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan	700.000
004-Unit kerja wilayah perbatasan yang telah menerapkan standar pelayanan mutu dan karantina	1.200.000
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui Bulan Bakti Karantina Ikan dan Mutu	9.350.000
QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	
001-Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	3.100.000
02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	
03-Ditjen Perikanan Tangkap	
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2338-Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	
QGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	
001-Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar	7.200.000
07-Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2365-Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	6.325.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	9.200.000

PN/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP)
RDQ-OM Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-OM Prasarana SKPT Pulau Morotai	-
03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
06-Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
2357-Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	
PEH-Promosi	
001-Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	33.300.000
002-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh daerah	3.400.000
12-Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	
032.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	
2376-Pendidikan Kelautan dan Perikanan	
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan Penerapan Ilmu Pengetahuan Atau Teknologi Pendidikan Tinggi	1.243.338
RAA-Sarana Bidang Pendidikan	
001-Peralatan dan Mesin Pendidikan KP	8.734.920
RBJ-Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	
001-Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	39.199.519
SAC-Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	146.857.163
04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	
07-Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2365-Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil	200.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	1.800.000
06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	
05-Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2350-Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	6.768.845
2352-Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	
QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	
001-Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	14.008.500
002-Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	1.600.000
07-Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	
032.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	
2362-Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	

PN/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP)
PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
001-Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	8.240.000
002-Rekomendasi Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	450.000
003-Rekomendasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	950.000
PEC-Kerja sama	
001-Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	300.000
PEE-Kemitraan	
001-Jejarang dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	1.000.000
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Dokumen NSPK Konservasi dan keanekaragaman Hayati Laut	2.760.000
QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	
001-Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	3.450.000
REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	
002-Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Operasional	15.520.000
003-Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan	3.900.000
REB-Konservasi Jenis/Spesies	
001-Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	4.180.000
002-Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan	10.400.000
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya	1.400.000
UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
001-Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	750.000
4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Dokumen NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.000.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	14.000.000
002-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap resiko Bencana dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	910.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
002-Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove	2.000.000
RBH-Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	
001-Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh	1.820.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.800.000
002-Prasarana Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	9.475.000
REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	
001-Kawasan mangrove yang direhabilitasi	5.700.000

PN/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP)
002-Vegetasi pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana	1.800.000
07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	
01-Sekretariat Jenderal	
032.WA-Program Dukungan Manajemen	
2322-Legislati, Litigasi dan Kerjasama	
PEC-Kerja sama	
001-Kerjasama Internasional bidang Kelautan dan Perikanan	6.500.000
05-Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2350-Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	
QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	
001-Operasi Kapal Pengawas	363.600.000
002-Operasi Pesawat Patroli	41.250.000
003-Operasi Speedboat Pengawas	15.400.000
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Kapal Pengawas	212.675.000
002-Speedboat Pengawas	10.500.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	15.000.000
RCG-OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
001-Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	81.500.000
RDS-OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001-Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	11.419.045
JUMLAH	2.892.185.763

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
secara elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2023

**RINCIAN PAGU ALOKASI ANGGARAN
PER PROGRAM DAN PER UNIT KERJA ESELON I TAHUN 2023**

Eselon I	USULAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp. 000)					
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Program Dukungan Manajemen	Jumlah
SETJEN	-	-	-	-	678.157.401	678.157.401
ITJEN	-	-	-	-	85.311.317	85.311.317
DJPT	508.490.831	-	-	-	447.161.568	955.652.399
DJPB	832.308.350	-	-	-	349.326.512	1.181.634.862
DJPSPDKP	823.000.000	-	-	-	328.263.731	1.151.263.731
DJPDS	101.844.186	148.575.814	-	-	138.080.000	388.500.000
DJPRL	137.455.000	-	91.805.000	-	190.740.000	420.000.000
BRSDMKP	5.373.250	-	-	327.300.950	1.050.962.966	1.383.637.166
BKIPM	62.575.000	35.275.000	-	-	425.650.000	523.500.000
Jumlah	2.471.046.617	183.850.814	91.805.000	327.300.950	3.693.653.495	6.767.656.876

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
secara elektronik

Effin Martiana